



International  
Labour  
Organization



A large, abstract graphic element is positioned diagonally across the page. It consists of several overlapping triangles: a large dark red triangle at the bottom, a smaller yellow triangle above it, a teal triangle to the right, and a white triangle at the bottom right corner.

# ► Perlindungan responsif gender bagi pekerja migran Indonesia

- ▶ **Perlindungan responsif gender bagi pekerja migran Indonesia**

Kompilasi peliputan program beasiswa media mengenai migrasi yang aman dan adil

# Daftar Isi

---

Kisah-Kisah Pilu PMI, Menjadi Korban Kekerasan Seksual Hingga Dipekerjakan di Klub Malam	1
Cerdas Bermedia, Hatiku bergembira	7
Pekerja Migran yang Melawan dengan Tulisan (1): Gunakan Medsoc untuk Advokasi	8
Pekerja Migran yang Melawan dengan Tulisan (2): Kompak Raih Penghargaan Sastra Kenamaan	10
Pekerja Migran yang Melawan dengan Tulisan (3-Habis) Kebijakan Diperbaiki tapi Kekerasan Tetap Terjadi	12
Pengalaman Tinggal di Kampung Pekerja Migran: Perempuan Pulang Jadi Korban Kekerasan	13
Derita Pekerja Migran di Negeri Seberang	18
Derita Pekerja Migran, Tersiksa di Tepat Kerja Gangguan Mental Saat Kembali	22
Derita PMI Hong Kong Tidur Sekamar Bersama Majikan	24
Neraka Pekerja Migran Indonesia di Pandemi Malaysia	28
Derita Pekerja Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur	33
Sehari Tiga Jenazah Pekerja Migran Non Prosedural Asal NTT Dipulangkan dari Malaysia	35
Ida Farida Berjuang Mendapatkan Hak Sebagai Pekerja Migran	41
Berangkat Tak Resmi, Pulang Dalam Peti Mati - Asa dan Derita Puan Pekerja Migran	47

# Kisah-Kisah Pilu PMI, Menjadi Korban Kekerasan Seksual Hingga Dipekerjakan di Klub Malam



▶ Didin Cahya / Radar Tulungagung / 16 November 2021

NM, tak mengira perjalanan pulang pada malam hari dari tempatnya bekerja di sebuah pabrik di Malaysia, telah membuatnya mendapatkan pengalaman paling pahit dalam hidupnya. Pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung itu, telah menjadi korban percobaan pemerkosaan oleh polisi negara setempat.

Dalam kondisi jalan sepi dari lalu lintas kendaraan, membuat oknum penegak hukum itu mencari kesempatan untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. "Saya semula tidak curiga karena sudah kenal. Saya dibuntuti dari belakang," ungkap perempuan 48 tahun tersebut.

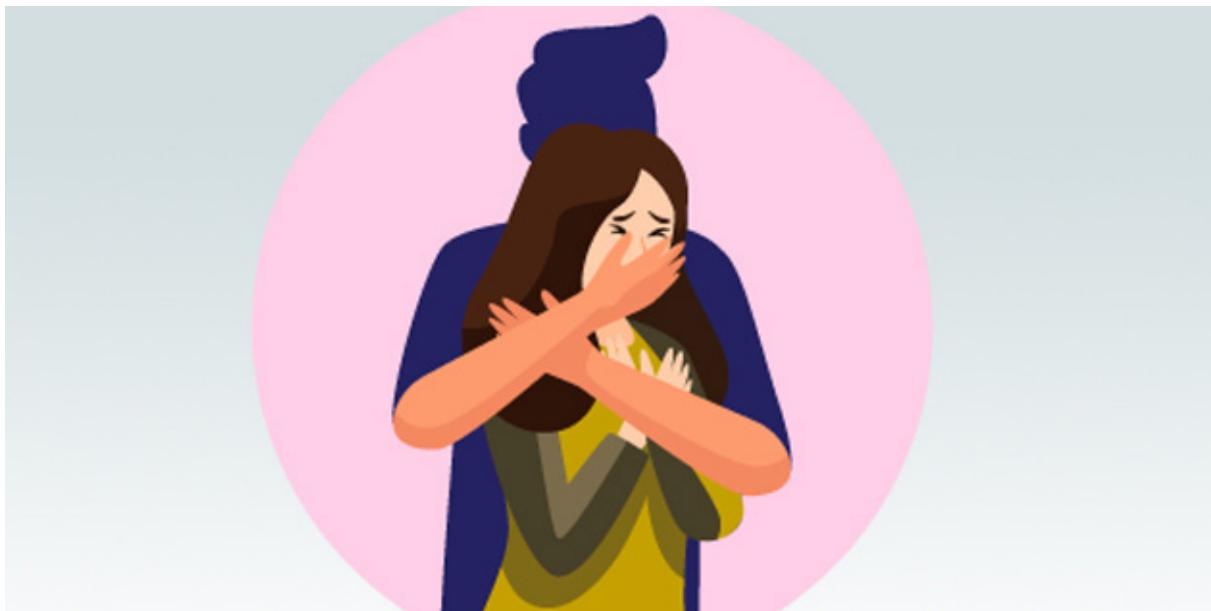
Nm tiba-tiba diminta berhenti oleh polisi tersebut dengan alasan polisi itu akan mengajaknya ngobrol. Merasa sudah kenal, permintaan laki-laki itu pun dipenuhi. Tak disangka niat baiknya justru dibalas dengan tindakan keji. Sang polisi mencoba melakukan pemerkosaan. Namun dengan sekuat tenaga, Nm melawan dan melarikan diri.

Tentu dalam hati NM begitu bimbang saat tiba di rumah kontrakannya usai peristiwa malam itu. Saat itu hanya ada pertanyaan motif apa yang membuat polisi tega melakukan pelecehan seksual. Ia tak pernah memikirkan peristiwa itu akan ia lapor ke polisi. Sebab statusnya sebagai PMI tak berdokumen akan semakin memperburuk keadaaan ketika ia menjalani aktivitas sehari-hari di negara orang. Apalagi jabatan dari polisi itu tergolong berpangkat.

Merasa serba sulit dan dalam posisi terjepit serta tidak tahu mesti berbuat apa setelah peristiwa tersebut, Nm memutuskan bekerja seperti biasa seolah-olah sebagai langkah menutupi peristiwa memilukan itu.

Hampir berjalan satu minggu usai percobaan pemerkosaan, Nm tiba-tiba ditangkap dalam razia yang dilakukan polisi dan keimigrasian Malaysia, yakni dengan tuduhan memalsukan kartu tanda penduduk (KTP) warga setempat.

Nm tidak bisa berikutik. Lantaran memang ia memalsukan foto KTP warga setempat yang sudah meninggal. KTP tersebut justru ia dapatkan dari polisi yang melakukan percobaan pemerkosaan. Waktu itu alasan ia menyetujui tawaran tersebut, karena jika sudah memiliki KTP dari warga setempat, maka ia diiming-imingi bisa bekerja di pabrik. Apalagi gaji dipabrik lebih tinggi dibandingkan sebagai pekerja rumah tangga (PRT). "Waktu di pabrik, kerja di bagian kualitas kontrol," ungkapnya ibu tiga anak ini.



Hanya bisa pasrah menghadapi cobaan hidup, Nm kemudian ditangkap dan mendekam di penjara.

Di balik jeruji besi saat itu Nm sudah tidak memiliki alat komunikasi dan hanya bisa berkumpul dan berbicara dengan orang-orang Indonesia yang mengalami nasib serupa.

Waktu demi waktu terus berjalan. Tiba saat untuk menghadapi persidangan. Tanpa didampingi penasihat hukum, Nm sebisa mungkin meyakinkan hakim agar dapat keringanan hukum. Hakim mevonisnya penjara selama 52 hari. Sementara sebelumnya sudah menjalani tahanan 48 hari. Artinya tersisa empat hari menunggu kebebasan. "Sebelum bebas dijemur dulu oleh sipir, itu mungkin sebagai kenang-kenangan. Masih bebas si polisi yang melakukan percobaan pemerkosaan," katanya. Ini artinya kasus percobaan perkosaan yang ia alami lepas begitu saja.

Nasib tak jauh beda juga dialami perempuan pekerja migran yang lain, Suparti. Perempuan asal Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tersebut mengalami tindakan penipuan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), yaitu dikontrak tidak sesuai dengan kontrak kerja dan kekerasan dari majikan tempatnya bekerja

Diawali niatan menjadi PMI di Singapura, Suparti akhirnya memutuskan mendaftar di P3MI di Jakarta. Semua berkas dilengkapi sesuai prosedur, termasuk pelatihan keterampilan, kursus bahasa, maupun penandatanganan kontrak kerja. "Siasat menyelipkan salinan fotokopi ini sebagai langkah pengamanan bukti kontrak kerja. Sebab dari perusahaan ini mengambil seluruh persyaratan PMI saat pemberangkatan," ungkap perempuan 40 tahun tersebut.

Usai tiba di Singapura, ia ditempatkan sebagai pekerja rumah tangga. Hati bergejolak saat empat bulan terakhir, karena kontrak kerja sebagai penjaga mal tidak dilakukan.

"Habis sudah kesabaran saat memasuki bulan ke 5. Saya bahkan ingat betul bagaimana perlakuan majikan yang sembarangan memerintahkan untuk mengambil kotoran anjing ditaman hingga tidak batasan untuk istirahat," tandasnya.

Ia akhirnya mempertanyakan ke P3MI di singapura. Tapi justru omelan didapatkan dan ancaman tidak akan bisa pulang ke Indonesia. Sang majikan semakin marah melihat ulah ibu satu anak ini. Majikan tetap menginginkannya bekerja di rumahnya.

Tak betah dengan perilaku tersebut, ia berangkat ke kedutaan RI di Singapura untuk mengadukan nasib dialaminya. Dialog antara perusahaan pemberangkatan PMI di Singapura, kedutaan, serta dirinya, digelar. Bukti-bukti kontrak kerja disodorkan dan pihak perusahaan tak bisa berikutki.

Dari pihak kedutaan memberikan keputusan untuk mengembalikan haknya. Namun perusahaan mau dengan syarat ada pengganti orang di majikannya.



***Dari berbagai kasus kekerasan ada berapa hal perlu dilakukan, agar peristiwa serupa tidak terulang.***

***Mulai penanganan dari hulu hingga hilir***

Ia bisa pulang setelah ada pengganti orang lain di lokasi kerjanya semula. Hak-haknya gaji dipenuhi. "Saya sebelum pulang waktu itu ada kesepakatan dengan pemilik perusahaan. Jika saya tidak bisa pulang akan membayar

5.000 dolar Singapura. Sebaliknya jika saya bisa pulang perusahaan akan membayar saya 2.000 dolar Singapura. Jadi sebelum pulang saya dapat uang tersebut," ungkapnya.



Usai dari kampung halaman, ia mencoba kembali bekerja menjadi PMI. Ia ingin kerja di Taiwan. Kali ini ia lagi-lagi mengalami masalah, ia tidak bisa menikmati gaji utuh. Sebab utang lebih dulu ke perusahaan pemberangkatan PMI. Di negara tersebut ia menerima sekitar 1,5 ribu dolar Taiwan atau sekitar Rp 600 ribu per bulan. Kondisi itu hampir 15 bulan. Belum lagi potongan BPJS, asuransi dari perusahaan, dan lain-lain.

***Tidak sedikit kades yang tidak mengetahui warganya berapa yang jadi PMI, mereka mengetahui ketika ada kasus kekerasan. Peran desa ini sangat penting untuk memperhatikan nasib PMI maupun keluarganya. Terutama anak-anak mereka yang ditinggal orang tuanya untuk merantau ke luar negeri dan PMI***

Padahal aktivitas pekerjaan sebagai PRT sangat menguras tenaga. Tiap pagi hingga malam melayani berbagai kebutuhan lansia. Praktis hanya berada di dalam kamar. Sesekali keluar membuang sampah dan mengatar sang majikan olahraga mupun berobat ke dokter.

Tak betah dengan kondisi itu membuatnya hanya menyelesaikan kontrak selama dua tahun. Lantas pulang kampung untuk bertani. "Ya belum tahu balik atau tidak, ini masih pandemi," pungkasnya.



Nasib kekerasan lain juga dialami perempuan pekerja migran, Is, warga di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dari kondisi kesulitan ekonomi membuatnya terdorong jadi PMI tahun 2002.

Usia perempuan tersebut masih 19 tahun waktu itu. Usaha untuk mengubah hidup dilakukannya dengan mendengarkan radio untuk mencari lowongan PMI. Tak lama kemudian, ada informasi pekerjaan di restoran di Negara Sakura. Lantas bergegas mendatangi lokasi pendaftaran di Desa Sawahan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Berbagai persyaratan pun di lengkapi. Mulai paspor hingga uang pendaftaran Rp 6 juta. Berangkatlah bersama dengan enam orang lainnya ke Jakarta.

Sebelum sampai di P3MI, si calo mengajak menginap di rumah kontrakan dan ia mendapatkan pelecehan seksual dari calo tersebut. "Saya pernah dirayu si calo untuk diajak tidur dengan imbalan bisa segera berangkat dan lolos seleksi atau kursus lebih cepat. Saya waktu itu menolak, karena niat bekerja, ketika tidak lolos cari yang lain. Ada teman saya termakan bujukan si calo, namun janjinya tidak terbukti, teman saya tidak lolos," ungkapnya.

Di lokasi penampungan P3MI, Is merasakan heran. Kursus bahasa hanya dua bulan itupun tidak detail. Hanya umum saja. Justru yang banyak peragaan busana tiap hari mirip fashion show.

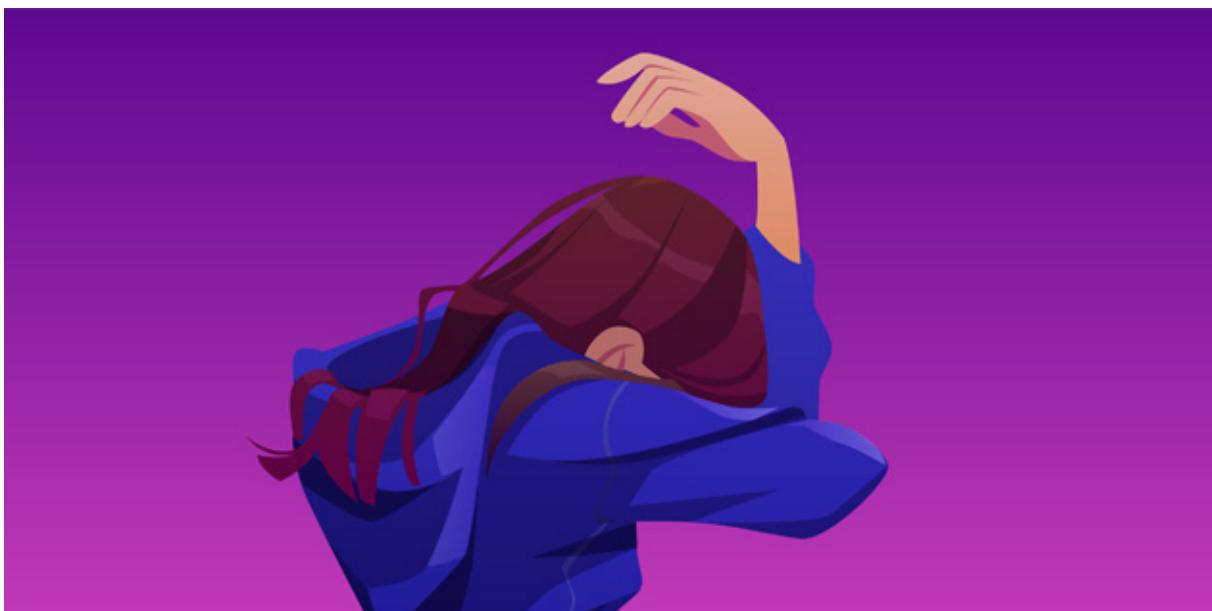
Setelah tiga bulan dipenampungan tiba saatnya bertolak ke Jepang usai mendapatkan paspor kunjungan wisata. Di sana ia tempatkan di mes dua lantai dan tertutup. Di lokasi tersebut bertemu dengan orang Tulungagung. Namun belum memberitahukan pekerjaan sebenarnya.

Saat berjalan tiga hari mulai curiga, sebab ia disuruh berpakaian minim dan pergi ke klub malam dan diantar penjaga. "Khawatir saat di klub malam. Sebab harus melayani tamu, tapi tidak sampai pemeriksaan. Ada tamu sekali melakukan melakukannya pelecehan seksual dengan memegang bagian tubuh tentu, tapi saya langsung menghindar. Waktu itu baru satu bulan menikah dan pergi keluar negeri. jadi ingat terus yang di rumah," ingat perempuan 38 tahun ini.

Di mes, Is sempat menangis karena takut. Kebetulan ada teman dari Tulungagung yang sudah lama di situ bertanya dan memberitahukan jika ingin tetap tinggal di mes dan bekerja di dunia hiburan atau pulang.

Belum genap 10 hari, lantas ia memutuskan pulang dengan meninggalkan 10 pakaian yang baru dibeli di Indonesia serta dibantu Rp 11 juta untuk biaya pulang oleh temannya tersebut. "Hanya bawa baju saja dan paspor. Jika sudah lewat 10 hari paspor akan ditarik majikan, sehingga saya cepat mengambil keputusan untuk pergi," bebernya.

Usai tiba di rumah tentu ia tidak menceritakan kondisi sebenarnya. Baru satu minggu kemudian ia berani menceritakan kepada keluarga apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ternyata, setelah itu, ia merasakan trauma dan sakit hingga satu bulan.



Kekerasan lain juga menimpa Ry, warga di Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Perempuan tersebut sejak tahun 2019 masuk ke Brunei Darusalam hingga akhir 2020 tidak dipekerjakan oleh agency. Bahkan ketika menutup hak untuk pulang, mendapatkan kekerasan ditonjok oleh pemilik perusahaan di sana. Dalah sang pemilik agency tidak memperkerjakan karena ingin menikahinya. Praktis ketika di rumah majikan hanya melayani keperluan majikan.

Kini kasus tersebut masih dalam proses persidangan setelah ditangani berbagai pihak terkait. "Terungkapnya kasus tersebut setelah Ry, telepon ke adiknya di kampung halaman," ungkap Kordinator Migrant Worker Resource Center (MRC) wilayah Tulungagung, Yatini.

Dari pihak keluarga langsung melaporkan ke disnakertrans dan diteruskan ke KBRI di Brunei Darusalam. Namun dalam perjalanan waktu, setelah bertemu dengan Ry, yang bersangkutan ini mengaku ada kesalahan dan sang majikan siap menikahi sehingga tidak diperkenankan pulang.

Berbagai upaya tidak berhasil melakukan evakuasi Ry ini, lantas MRC berkordinasi dengan Non Goverment Organization (NGO) perempuan di sana untuk melakukan pendampingan. Hasilnya ada beberapa fakta, jika Ry mengalami kekerasan fisik, bahkan disuruh bayar 5.000 dolar Brunei jika ingin pulang.

Usai melakukan pendekatan kepada majikan, Ry berhasil dievakuasi dan proses hukum terus lanjut termasuk kepada pemilik hukum. "Dari berbagai kasus kekerasan ada berapa hal perlu dilakukan, agar peristiwa serupa tidak terulang. Mulai penanganan dari hulu hingga hilir," katanya.

Sejak dipenampungan para PMI sudah terjadi kekerasan dari P3MI. Termasuk tidak boleh keluar, tidak boleh menggunakan alat komunikasi, makan dan tidur diatur, keluarga tidak boleh menjenguk. Jadi mereka sudah dibiasakan seperti budak.

Bahkan kini ada sekitar 1.200 calon PMI di Kabupaten Tulungagung ini masih menunggu keberangkatan. Mereka yang masih ada dipenampungan disuruh untuk membayar biaya tambahan. Sedangkan yang tidak dipenampungan masih menunggu kepastian.

Ia mengaku, untuk pengawasan bagi P3MI, sebenarnya merupakan kewenangan dari dinas tenaga kerja (disnaker) provinsi. Namun persoalannya tenaga mereka hanya tiga personel dan lokasi penampungan berada di kabupaten sehingga tidak maksimal. Belum lagi pemahaman terkait migrasi yang tidak begitu mendetail.

Tak hanya dipenampungan, ketika berada di negara tujuan, masih banyak pekerja migran yang bekerja dan tidak sesuai kontrak. Bahkan rawan mengalami kekerasan fisik seperti pemerkosaan. Jadi solusinya ini perlu ada pemahaman bagi calon PMI ini bagaimana cara bermigrasi aman. Calon PMI ini sebelum berangkat ini harus mengetahui hak-hak mereka yang didapatkan sebelum berangkat hingga saat berada di negara penempatan.

Di samping itu, para PMI ini berserikat sebagai upaya peningkatan pemahaman, bisa memberikan argumentasi ketika ada ketidakadilan, mendapatkan pendampingan saat ada persoalan.

Melibatkan peran masyarakat terutama desa tak bisa dilepaskan, karena desa akan lebih mudah dijangkau PMI untuk mendapatkan informasi terkait protokol layanan, pengaduan, dan lain-lain.

## Peningkatan Pemahaman Minim Diberikan pada PMI

Sementara itu, Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur Fifi Ekawati Rahma mengatakan, pemicu kekerasan ini masih banyak kesalahan pemahaman atau budaya yang menganggap perempuan layak untuk dilecehkan. Maka pemikiran tersebut harus dikhidis karena mereka memiliki kesempatan yang sama dengan pekerja migran laki-laki.

Termasuk ketika para calon PMI ini harus mendapatkan informasi yang benar dan kesempatan sama dan setara. Kalau laki-laki digaji perempuan harus digaji sama. "Dari berapa kali pelatihan perempuan PMI, mereka sudah sadar jika harus menempuh jalur resmi agar bisa aman. Itu menunjukkan masih sering terjadi kekerasan terhadap perempuan ini akan timbul kesadaran," ungkapnya.

Beberapa hal sering terjadi negara penempatan, di antaranya tak sesuai kontrak, tidak boleh komunikasi, tidak mendapatkan jam istirahat, jam ibadah, tempat dan makan tidak layak.

Konvensi International Labour Organization (ILO) 190 yaitu konvensi untuk penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja menyatakan, bahwa semua pekerja tak boleh mendapatkan kekerasan dan pelecehan, baik dari rumah, di jalan, hingga ke tempat kerja. Kasus yang dialami para perempuan PMI ini menunjukkan banyaknya kekerasan seksual yang mereka alami sejak mereka belum dipekerjakan atau belum ditempatkan, yaitu dari perekrutan, di penampungan-penampungan, hingga penempatan atau di tempat kerja. Situasi ini ternyata sangat rawan dialami para perempuan PMI. Konvensi ILO 190 menjadi sangat relevan untuk segera disahkan agar para perempuan PMI terlepas dari situasi pelecehan dan kekerasan seksual.

Disikapi disnaketrans, ia menyatakan, hal ini agar bisa tertangani dari hulu sampai hilir, salah satunya dengan menerbitkan aturan di desa atau peraturan desa (perdes).

"Sudah merencanakan peraturan desa (perdes) untuk perlindungan PMI," ungkap Kepala Disnakertrans Kabupaten Tulungagung Agus Susanto.

Di perdes tersebut akan mengatur terkait pelayanan, perlindungan PMI, serta keluarga PMI. Di mana peran desa dan kecamatan akan intensifkan. Mulai dari alur pendaftaran calon PMI ini harus mendapatkan rekomendasi dari desa. Jadi kepala desa (kades) mengetahui apakah warganya ini benar-benar ingin bekerja atau hanya pelarian untuk menghindari pertikaian keluarga.

"Tidak sedikit kades yang tidak mengetahui warganya berapa yang jadi PMI, mereka mengetahui ketika ada kasus kekerasan. Peran desa ini sangat penting untuk memperhatikan nasib PMI maupun keluarganya. Terutama anak-anak mereka yang ditinggal orang tuanya untuk merantau ke luar negeri dan PMI," ungkapnya.

Berbagai kasus muncul akibat kekurangan perhatian orang tua terhadap anak-anak PMI. Mereka jadi korban kekerasan seksual maupun terjerat narkoba. Dengan ada perdes nanti akan ada pengawasan dari desa maupun keluarga PMI untuk bersama-sama tanggungjawab memantau anak-anak PMI, bisa berupa bimbingan konseling maupun bentuk kegiatan positif lainnya.

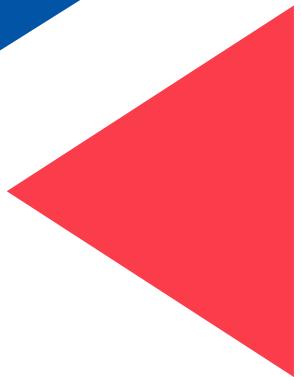
Di samping informasi seputar PMI lewat desa, di disnakertrans sudah ada layanan terpadu satu atap (LTSA) yang bisa menunjang informasi terkait PMI.

Tak kalah penting terkait pemberdayaan PMI purna. Sebab tiap bulan rata-rata PMI pulang kampung mencapai 1.500 orang. Dengan demikian ada potensi pengangguran. Maka peran desa ini sangat vital untuk pemberdayaan ekonomi mereka, termasuk melibatkan dinas pemberdayaan desa (DPMD) untuk memetakan potensi desa.

Bagaimana dengan peran desmigratif? Agus Susanto mengaku, desa-desa yang sudah jadi lokasi desmigratif ini tidak hanya satu atau dua, tapi ratusan. Sebab ada 100 desa kantong PMI di Kabupaten Tulungagung. Jadi di desa desmigratif termasuk Desa, Betak, Desa Pagersari, Kecamatan Kalidawir, bisa sebagai pilot untuk pembuatan perdes.

Untuk mematangkan pembuatan perdes ini perlu ada dengar pendapat agar semua kepentingan pihak-pihak terkait di desa bisa terakomodasi secara baik dan transparan. Dengan demikian ketika sudah disahkan jadi produk hukum sudah siap dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi di lapangan. (din/c1/luv)

# Cerdas Bermedia, Hatiku bergembira



▶ Risma Erina A'ini/LPPL Radio Persada FM/12 November 2021



# Pekerja Migran yang Melawan dengan Tulisan (1): Gunakan Medsoc untuk Advokasi



► Maratun Nashihah/Suara Merdeka/12 November 2021

TULISAN bisa mengubah nasib seseorang. Setidaknya itulah yang dibuktikan oleh para perempuan pekerja migran.

Menggunakan tulisan, mereka mengadvokasi sesama pekerja migran sehingga tidak lagi menjadi korban kekerasan.

SEBAGAI pekerja rumah tangga (PRT) di Singapura, Novia Arluma dibayar sesuai standar. Dia mendapat libur sehari dalam sepekan, serta juga bebas berorganisasi dan berserikat.

Namun kegiatannya sebagai sukarelawan di sebuah NGO sejak 2014 membuat perempuan asal Lumajang itu tersadar, tak semua pekerja migran punya kesempatan seperti dirinya.

Banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan upah sesuai standar dan hak libur kerja.

Padahal tanpa libur, mereka tak memiliki kesempatan untuk keluar sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mereka sulit mendapatkan pertolongan.

Mereka juga kehilangan peluang untuk bercengkerama dan merilis beban psikologis bersama teman.

Hal itu membuat Novia tergerak untuk mengidentifikasi persoalan dan menuliskan hasilnya di media sosial.

Dia berharap, banyak pekerja migran yang belajar dan tidak mengalami masalah yang sama.

"Dari pengalaman mendampingi pekerja migran yang bermasalah, saya mengidentifikasi bahwa permasalahan yang diadukan serupa dari waktu ke waktu. Yang paling utama soal hak libur kerja. Hal ini membuat saya terpantik untuk menulis," kata Novia yang bekerja sebagai PRT di Singapura sejak 2006.

Media sosial Facebook dipilih karena dianggap fleksibel. Hampir semua pekerja migran mengakses media sosial tersebut.

Selain berbagi informasi tentang kasus yang menimpa pekerja migran, dia juga menggunakan kanal itu untuk mengungkap kebijakan terbaru terkait PRT di Singapura serta menyampaikan kritik kepada pengambil kebijakan.



## Di-share Ribuan Kali

"Saat ada pekerja migran Myanmar yang bunuh diri, saya menulis surat terbuka. Tulisan itu di-share hingga ribuan kali. Bahkan dikutip oleh media Singapura," kenang Novia yang sejak 27 Juni lalu fokus mengelola IP2MI (Ikatan Persaudaraan Pekerja Migran Indonesia).

Organisasi yang disokong oleh International Domestic Worker Federation (IDWF) ini ditujukan untuk menumbuhkan bibit-bibit baru yang bisa menyuarakan hak pekerja migran, khususnya PRT.

Sayang, media sosial itu akhirnya hilang. Akunnya tidak bisa diakses.

Novia pun beralih menggunakan blog penanova.id sebagai penyambung suara.

Dia mengakui, saat ini banyak kebijakan yang mulai berpihak pada pekerja migran.

Sayangnya tak semua pekerja migran paham.

Dia mencontohkan, masih banyak pekerja migran yang tak mengetahui bahwa Singapura sejak 2013 telah mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan hak libur sehari dalam sepekan kepada buruh migran.

Bahkan, sebagaimana yang ditulis Novia di laman penanova.id, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan Singapura (MOM) telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu larangan bagi majikan untuk mengganti hari libur dengan upah pengganti.

Ini berarti hak libur wajib diberikan, dan selain itu MOM juga akan melakukan kunjungan secara berkala untuk memastikan kondisi tenaga migran.

Bagi Novia selain untuk menyuarakan ketimpangan, menulis juga untuk mengimbangi stigma negatif terhadap pekerja migran.

Dia berharap, meski tulisannya tidak bisa dengan serta-merta mengubah kebijakan, setidaknya dia telah menyuarakan aspirasi pekerja migran.

"Even if I can not change policies, I will still happy to contribute towards protecting my fellow MDW's (Bahkan jika saya tidak bisa mengubah kebijakan, saya akan tetap bahagia karena bisa turut berkontribusi melindungi rekan-rekan PRT)," demikian kata Novia sebagaimana tertulis di laman salah NGO yang menasbihkannya sebagai tokoh perubahan (the changemaker).\*\*\*

# Pekerja Migran yang Melawan dengan Tulisan (2): Kompak Raih Penghargaan Sastra Kenamaan



► Etik Juwita/Suara Merdeka/12 November 2021

KEMAJUAN teknologi digital memang memungkinkan para pekerja migran untuk lebih leluasa menyuarakan aspirasi melalui tulisan.

Dengan menggunakan media sosial mereka merespons berbagai persoalan dari sudut pandang mereka sebagai pekerja migran.

Selain Novia, ada sejumlah perempuan pekerja migran lain yang juga lantang bersuara melalui tulisan yang diunggah di media sosial.

Etik Juwita salah satunya, di mana perempuan kelahiran Blitar yang dalam 10 tahun terakhir malang-melintang sebagai pekerja migran di Hong Kong, Singapura, dan Taiwan ini sejak 2018 aktif menulis di laman id.quora.com.

Dengan bahasa yang cair dan ringan, dia menanggapi berbagai pertanyaan publik seputar pekerja migran.

Tak jarang tulisan-tulisannya menampar pengambil kebijakan.

► ***Awalnya tahun 2014, saya menulis puisi di Facebook untuk mengungkapkan kerinduan pada anak dan kekuarga. Setelah itu saya bertemu banyak penulis di dunia maya dan mulai terlibat di banyak kegiatan kepenulisan***

Saat menanggapi pertanyaan soal pekerja migran yang diagung-agungkan sebagai pahlawan devisa misalnya, dia dengan lugas menyatakan betapa tidak adilnya pemerintah terhadap mereka.

Dia mengatakan, pengiriman pekerja (migran) kasar ke luar negeri adalah bukti kegagalan pemerintah menyediakan



lapangan kerja.

Pekerja migran dimanfaatkan untuk menekan angka kemiskinan di daerah sekaligus juga menambah penghasilan dari remitansi.

"Namun sejauh mana upaya pemerintah meningkatkan daya tawar pekerja migran Indonesia di luar negeri dan memperbaiki nasib mereka, I can loudly say, 'not much', " tulisnya.

Meski belum terlalu lama aktif di quora, menulis bukan hal baru bagi Etik Juwita.

Sekjak pertama menjadi pekerja migran di Hong Kong pada 2004, dia telah aktif menulis.

Sejumlah cerita pendek karyanya menghiasi berbagai media, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada 2008, bersanding dengan sejumlah sastrawan kenamaan Indonesia, dia menerima penghargaan Anugerah Sastra Pena Kencana.

Tak mengherankan jika sejumlah karya lulusan Universitas Gajayana Malang ini telah dibukukan.

"Hampir semua cerpen saya tentang pekerja migran. Bagi saya, kehidupan pekerja migran adalah inspirasi yang tak pernah habis untuk ditulis," katanya.

## Kuliah Pascasarjana

Setali tiga uang dengan Etik Juwita, Etik Nurhalimah juga banyak menulis tentang pekerja migran dalam cerpen-cerpennya.

Keduanya pada tahun 2020 lalu sama-sama meraih penghargaan Taiwan Literature Awards, salah satu penghargaan bergengsi untuk para sastrawan yang diadakan oleh National Museum of Taiwan Literature.

Seperti Etik Juwita, Etik Nurhalimah juga sempat menjadi PRT di Singapura dan Hong Kong.

Namun dia mengaku jalan kepenulisannya baru dia temukan setelah bekerja di Taiwan.

Kini, di sela kesibukannya mengasuh nenek berusia 96 tahun, dia aktif membaca dan menulis baik fiksi maupun nonfiksi.

"Awalnya tahun 2014, saya menulis puisi di Facebook untuk mengungkapkan kerinduan pada anak dan kekuarga. Setelah itu saya bertemu banyak penulis di dunia maya dan mulai terlibat di banyak kegiatan kepenulisan."

"Beberapa kali saya menang lomba menulis puisi. Setelah itu saya terpikir untuk menggali kemampuan di bidang menulis hingga akhirnya saat ini saya bahkan bisa mendapatkan penghasilan dari menulis," katanya panjang lebar.

Etik kini tak hanya menulis cerpen dan puisi. Perempuan asal Way Jepara, Lampung Timur itu juga menjadi penulis artikel dan kolom di beberapa media setempat. Bermitra dengan sebuah NGO, dia mengadvokasi pekerja migran melalui tulisan.

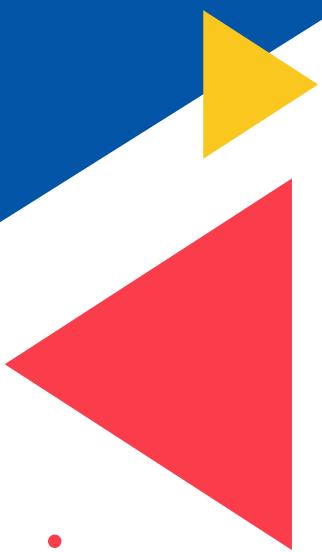
Baginya, menulis adalah mengubah nasib. Tak hanya mengubah nasib pekerja migran yang diadvokasi, tapi juga mengubah nasibnya sendiri.

"Dengan menulis, saya jadi membaca. Dan dengan membaca, terbukalah cakrawala. Saya yang tak pernah bermimpi bisa kuliah, kini tengah menjadi mahasiswa pascasarjana. Semua tak mungkin saya capai jika saya tidak menulis," kata Etik.

Baginya, hidup adalah terus bertumbuh dan berproses menjadi lebih baik.\*\*\*

# Pekerja Migran yang Melawan dengan Tulisan (3-Habis)

## Kebijakan Diperbaiki tapi Kekerasan Tetap Terjadi



► Maratun Nashihah/Suara Merdeka/15 November 2021



# Pengalaman Tinggal di Kampung Pekerja Migran: Perempuan Pulang Jadi Korban Kekerasan



► Nurul Nur Azizah/Konde.co/15 November 2021

*Lahir dan hidup di salah satu kampung yang banyak 'melahirkan' pekerja migran serta hidup bersama orangtua dan saudara yang bekerja sebagai pekerja migran, membuat kami terbiasa dengan persoalan yang menimpak mereka. Banyak perempuan yang mengalami pelecehan dan kekerasan.*

TAHUN 2000-an, saya bersama keluarga besar sering melakukan perjalanan Blitar-Surabaya. Kami mengendarai mobil sewaan menuju Bandara Juanda, Surabaya. Tidak menginap di hotel, kami biasanya bables atau terus tidur saja di mobil. Makan juga dari bekal yang kami bawa atau sesekali mampir di warung makan.

Selama dua atau tiga hari itu, kami melakukan perjalanan berangkat sampai pulang lagi ke rumah, itulah saat-saat kami menjemput Paman atau Bibi dari luar negeri. Ada yang dari Malaysia atau juga Hong Kong. Itu hal biasa dan sering kami lakukan

Di keluarga ayah saya, mayoritasnya memang kami bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tak kurang Lima dari tujuh bersaudara pernah jadi tenaga kerja di luar negeri. Lidah Jawa kami menyebut, mereka lungo (pergi jadi PMI). Ada yang sebentar, sekitar dua tiga tahun, tapi ada juga yang sampai belasan tahun.

Di usia sekolah dasar, saya melihat, banyak orang sekitar saya yang kemudian menjadi PMI, dan ini sangatlah lumrah terjadi. Para calon penyalur PMI juga banyak yang hilir mudik menawarkan masyarakat untuk jadi PMI. Mereka bahkan datang dari rumah ke rumah dan melakukan promosi dari mulut ke mulut. Semuanya senada: mengiming-imingi 'hidup enak' jadi PMI. Gaji lumayan dibanding kerja bertani di desa. Pulang-pulang, juga banyak yang bisa bangun rumah atau punya modal buat nikah.



Tak kehabisan akal, para calo ini memang lihai sekali mengajak para calon PMI. Katanya, tinggal menunggu di rumah, persyaratan ini dan itu sudah beres. Tak punya modal berangkat, juga bisa potong gaji. Berbagai media massa seperti radio dan televisi lokal di tahun-tahun itu pun, tak kalah ramai menyiarakan PT (Perseroan Terbatas) yang mengajak calon PMI bisa segera diberangkatkan ke negara tujuan.



***Calo saling lempar dan merasa juga sebagai 'korban' yang menyetor uang ke PT. Masalah ini terjadi karena minimnya edukasi masyarakat, mereka lebih percaya pada calo yang memberi janji manis, sementara perhatian desa minim***

Maka tidak mengherankan, anak-anak muda yang bermodalkan ijazah SD maupun SMP kala itu, berbondong-bondong ‘mencari peruntungan’ ke luar negeri. Angan-angan, bisa cepat dapat duit dan tampak bisa ‘bergaya’ dengan status sosial di tengah masyarakat. Siapa yang tidak mau?

Seiring berjalannya waktu dan usia saya semakin bertambah, rasanya saya semakin memahami, bahwa sebetulnya banyak yang jadi PMI ini bukan saja karena faktor ekonomi. Namun, alasan lungo para PMI ini ternyata bisa juga karena kondisi keluarga yang kurang harmonis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sampai korban pernikahan anak akibat kehamilan tidak diinginkan (KTD).

Untuk yang terakhir, saya melihat sendiri dari kondisi beberapa teman perempuan saya yang pernah dikeluarkan dari sekolah akibat KTD, lalu menikah dan memutuskan untuk jadi PMI. Mereka masih berusia belasan tahun, namun harus putus sekolah. Dikarenakan tak punya pengalaman bekerja dan ada juga yang malu dengan kondisinya, hingga akhirnya memutuskan jadi PMI ke luar negeri.

Perempuanlah yang selama ini banyak saya jumpai di sekitar saya yang mengalami banyak kondisi sulit ini. Bukan saja kekerasan berbasis gender (KBG) yang mereka terima sebelum berangkat, namun ada pula yang ketika telah bekerja di luar negeri mendapat kekerasan

Salah satu tante atau Bulik atau tante, adik ipar dari ayah saya, pernah mengalami KBG itu saat bekerja di Hong Kong pada sekitar tahun 2010. Saat mau diberangkatkan, dia dijanjikan akan menjadi perawat lansia dengan jam kerja layak. Namun, begitu sudah sampai di negara tujuan, ternyata dia harus melakukan pekerjaan tidak sesuai kontrak yang bebannya ganda. Dia harus mengurus lansia, urusan rumah tangga, sampai menjual ikan milik majikan di pasar setempat. Jam kerjanya pun, sampai belasan jam sehari dengan libur sekali sepekan.

Pernah suatu kali Bulik cerita, Bulik juga sempat mengalami pelecehan seksual selama bekerja. Bukan saja dari candaan seksis yang dilontarkan majikan. Pernah juga, saat dia menawarkan ikan yang dijualnya, dia mendapat catcalling ataupun rabaan pada pundak serta pinggul dari pembeli. Tak tau apa yang bisa dilakukan, Bulik saat itu hanya diam saja dan menyimpan cerita itu bertahun-tahun sendiri.

"Ya bingung mau kayak gimana, cuma disimpan saja sendiri. Apalagi kan kita di tempat (negara) orang, kalau malah gimana-gimana atau dipecat kan?" ujar Bulik Lestari, ketika berbincang dengan Konde.co, Minggu (14/11/2021).

Minimnya akses pengetahuan dan informasi, menurut Lestari, memang tidak dipungkiri terjadi. Kala itu, dia hanya tahu soal PMI dari lingkungan sekitarnya dan calo yang datang menawari pekerjaan ke luar negeri. Sementara, soal hak-hak serta jaminan perlindungan yang bisa diakses pun serba minim.

"Gak paham dulu itu, ini termasuk kekerasan yang harusnya bisa dimana lapornya, ya udah dapat gaji aja kan kita fokusnya," katanya

## 'Puncak Gunung Es' Kekerasan Perempuan PMI

Kekerasan berbasis gender terhadap PMI perempuan, bukanlah 'pepesan kosong'. Sebagai keluarga dan lingkaran terdekat dari PMI, saya melihat sendiri hal itu seringkali terjadi.

Namun fenomenanya seolah seperti 'puncak gunung es' alias apa yang tampak sebetulnya menggambarkan masalah serius yang lebih besar. Begitu sistematis dan belum mendapatkan perhatian optimal.

Meskipun tidak semasif dulu, kondisi saat ini nyatanya juga belum banyak berubah. PMI perempuan masih rentan menjadi korban KBG. Sedangkan, payung hukum yang melindunginya pun masih minim dijalankan. Termasuk di lingkup desa-desa yang menjadi 'kantong-kantong' daerah asal PMI.

Wilayah Blitar dan Tulungagung (TA) termasuk daerah asal PMI terbanyak di Jawa Timur bahkan Indonesia. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI), selama lima tahun terakhir Jawa Timur memiliki penempatan terbesar PMI dengan jumlah penempatan sebanyak 177.016 orang. Di Jawa Timur yang terbanyak menempatkan PMI adalah Ponorogo 10.067 orang, disusul Blitar 9.206 orang, Malang 8.857 orang dan Tulungagung 7.116 orang.

Koordinator Migrant Worker Resource Center (MRC) di kawasan Tulungagung dan Blitar, Yatini mengatakan, kekerasan pada PMI perempuan ataupun calon PMI perempuan ada banyak modusnya. Kasus teranyar di TA yang pihaknya tangani adalah kasus penipuan calon PMI yang banyak di antaranya perempuan akibat tertipu calo.

Puluhan dari mereka telah menyetor uang sampai Rp 75 jutaan rupiah, namun belum juga diberangkatkan. Padahal sebetulnya, aturan saat ini tidak lagi dizinkan penggunaan calo namun harus melalui Dinas dalam pemberangkatan PMI. Tapi di tengah masyarakat, praktik itu masih terjadi. Mereka bahkan lebih percaya calo dibandingkan perangkat desa atau dinas setempat. Imbasnya, banyak yang kena tipu.

"Calo saling lempar dan merasa juga sebagai 'korban' yang menyetor uang ke PT. Masalah ini terjadi karena minimnya edukasi masyarakat, mereka lebih percaya pada calo yang memberi janji manis, sementara perhatian desa minim," ujar Yatini kepada Konde.co, pertengahan Oktober 2021 lalu.

Tidak hanya penipuan yang marak terjadi, KBG pada PMI perempuan juga menjadi ancaman. Salah seorang pendamping lapangan MRC wilayah TA dan Blitar, Siti Masruroh menyampaikan, dirinya belum lama ini turut menangani kasus kekerasan PMI perempuan di Brunei Darussalam. Selain dia mengalami eksplorasi jam kerja, korban itu juga mengalami kekerasan fisik seperti penyekapan sampai lebam-lebam. Setelah dia ditipu, dengan iming-iming majikan yang berjanji akan menikahi.

"Janjinya mau dinikahi juga, tapi tidak jadi (dinikahi) dan tidak digaji, akhirnya melaporkan ke KBRI. PMI itu dijemput, posisi sekarang dia bekerja dan digaji oleh KBRI sambil menunggu proses siding," ujar Masruroh dihubungi Konde.co pada 30 Oktober 2021.



***Itu desa (melalui Perdes) yang harus membimbing dan terjun langsung. Selama ini, jangan terjadi lagi perempuan korban kekerasan PMI ataupun anak-anak PMI yang dimanfaatkan oleh penjahat seks (pedofilia)***

Perempuan PMI korban kekerasan itu kemudian pergi dari majikan, dan menelepon anaknya yang ada di Indonesia. Pihak MRC lalu melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan, dan menghubungi KBRI serta kerja sama organisasi terkait yang mengadvokasi PMI di Brunei.

“PMI-nya ini sempat menolak dibawa KBRI, menolak mengakui padahal sudah lebam juga ini, karena mungkin dapat ancaman juga,” imbuhnya.

Masruroh mengungkap, kekerasan terhadap PMI perempuan ini hingga saat ini juga terus berkembang modusnya. Misalnya saja, penipuan lowongan kerja hingga kekerasan berbasis gender secara online (KBGO) melalui sosial media. Minimnya edukasi dan belum optimalnya mekanisme pelaporan kasus menjadi hambatan yang perlu segera dicari solusinya.

## Mendorong Peran Desa untuk PMI Perempuan

Banyaknya kasus kekerasan PMI perempuan, membutuhkan peran konkret dari desa. Namun selama ini, masih belum optimal dilakukan. Yatini dari MRC Tulungagung dan Blitar menyampaikan, selain edukasi perangkat desa soal PMI memang perlu juga kewenangan desa terhadap aturan perlindungan PMI perempuan. Salah satunya melalui Peraturan Desa (Perdes) yang memuat mekanisme hingga pembiayaan pada program perlindungan.

Sampai saat ini, Yatini merinci ada setidaknya 9 desa percontohan yang tengah didampingi untuk menggodok pembuatan Perdes di Tulungagung dan Blitar. Program ini merupakan kerja sama dengan International Labour Organisation (ILO).

Pada 21 Oktober 2021 lalu, para perangkat desa mendapatkan training dalam proses pendampingan pembuatan Perdes soal PMI. Acara yang berlangsung sehari penuh itu, para perangkat desa mendapat sosialisasi soal peran pentingnya bagi perlindungan PMI, brainstorming permasalahan berperspektif gender terkait PMI hingga apa saja hal yang perlu dimasukkan dalam Perdes.

Sejauh ini, memang belum ada desa yang sudah mempunyai Peraturan Desa/ Perdes di kawasan Tulung Agung dan Blitar yang spesifik soal PMI. Terlebih, menyoal kekerasan terhadap perempuan. Pun dengan data-datanya yang dihimpun per tahun oleh desa masih sangat minim. Masalah yang dialami oleh PMI perempuan ini, acapkali hanya menjadi cerita-cerita.

Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Agung, Tulung Agung, Hariani, yang hadir dalam training tersebut tak menampik. Peran desa memang dibutuhkan dalam upaya perlindungan PMI. Masalah yang sering muncul di daerahnya adalah, PMI perempuan yang mendapatkan kekerasan tidak ada informasi dan mekanisme yang jelas untuk melapor.

“Perlindungan itu saya pikir buat anak-anak PMI perempuan juga yang kadang ditinggal ibunya itu punya beban atau juga jadi korban kekerasan,” ujar Hariani kepada Konde.co melalui sambungan telepon, 30 Oktober 2021.

Perdes PMI itu, pihaknya harapkan juga memiliki peran dalam mengedukasi PMI dan keluarganya. Utamanya, soal percaloan yang masih marak terjadi. Desa Sumber Agung memang tergolong jauh dari pusat kota Tulung Agung, yaitu sekitar 45 menit berkendara. Akses yang juga mencakup daerah pegunungan itu, menjadikan banyak masyarakat ‘tidak mau repot’ dan mengandalkan calo PMI.

“Jadi orang itu sudah kebiasaan ngurus apapun, pakai calo. Gak mau ribet. Kalau di Perdes-kan, kan semua ada aturannya,” kata dia.

Dia menyampaikan, setidaknya 20-25% persen masyarakat yang berjumlah sekitar 7.000 orang di desa Sumber Agung memang berprofesi sebagai PMI yang didominasi perempuan. Negara tujuan PMI itu pun beragam mulai dari Hong Kong, Taiwan, Arab, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam hingga Korea Selatan.

Usai training perangkat desa, Suhartini menyampaikan, pihaknya kini tengah menginventarisir masalah-masalah PMI yang rencananya akan dimasukkan dalam Perdes. Targetnya, Perdes itu akan rampung di awal 2022. Seiring itu, nantinya juga akan disiapkan tim yang berfokus dalam Perdes PMI serta infrastruktur yang mendukung.

“Soalnya, 2021 ini sudah gak bisa mengubah anggaran desa. Sudah akhir tahun. Bisa dimasukkannya ke 2022, tapi jika sekadar pertemuan (musyawarah desa) bisa,” katanya.

Senada, Kasi Pemerintahan Desa Jatidowo, Tulung Agung, Nuradiniah juga mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan Perdes akan direncanakan bisa dijalankan pada awal tahun 2022.

"Perdes PMI rencana kan Februari (2022), berarti Desember 2021 sudah punya draftnya, termasuk apa saja yang ada di situ," ucap Nuradiniah ketika dihubungi Konde.co pada 2 November 2021.

Menurut Nuradiniah memang ada banyak masalah soal PMI yang perlu diangkat dalam Perdes tersebut. Salah satu yang terpenting adalah mekanisme sosialisasi dan konseling PMI yang difasilitasi desa. Sebab selama ini, banyak masyarakat yang justru mendapatkan sumber informasi salah dari agen-agen atau calo secara ilegal. Substansi perlindungan bagi PMI perempuan juga kata dia, penting dimasukkan dalam Perdes.

"Perlindungan perempuan juga akan diprioritaskan," tegasnya.

"Pematerian soal perspektif gender ini juga sedang kami komunikasikan sama MRC. Dulu hanya pemahaman soal jenis kelamin saja, ternyata lebih banyak pengetahuan soal gender itu," imbuhnya.

Pejabat desa itu juga bilang, Perdes nantinya secara lebih luas diharapkan bisa pula mengakomodir kebutuhan para korban kekerasan berbasis gender pada PMI. Mulai dari tahapan pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban. Semua substansi itu nantinya akan dirembug bersama oleh para perangkat desa dan dinas setempat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulung Agung, Agus Santoso menyambut baik adanya gerakan bersama untuk mendorong adanya Perdes soal PMI. Dia menyadari bahwa selama ini, pihak desa masih minim perannya untuk perlindungan PMI.

Maka dari itu, Perdes soal PMI ini bisa diterapkan. Semisal saja, fungsinya memunculkan rekomendasi Kepala Desa.

"Nanti (di Perdes PMI) ada rekomendasi Pak Kades bahwa keluarga ini layak apa enggak. Tidak akan kita layani, lek gejer karo bojo (bertengkar dengan suami/istri). Benar-benar ada survei Pak Kades. Keluarga yang akan berangkat itu dalam kondisi harmonis," ujar Agus saat ditemui Konde.co di Kantor Disnaker TA pada 21 Oktober 2021.

Dalam aplikasinya, Perdes soal PMI yang tengah disusun oleh para perangkat desa percontohan di Tulung Agung dan Blitar ini pun, menurut Agus harus bersikap terapan. Jadi, bukan hanya sebatas aturan kaku di atas kertas melainkan harus realistik diterapkan.

Selain itu, penting pula Perdes PMI bisa bersifat komprehensif dalam memotret berbagai masalah kompleks yang selama ini terjadi di masyarakat. Terlebih, masalah kekerasan berbasis gender soal PMI perempuan serta anak-anak. Baik yang terjadi ketika masih menjadi calon PMI, sudah menjadi PMI ataupun purna PMI.

"Itu desa (melalui Perdes) yang harus membimbing dan terjun langsung. Selama ini, jangan terjadi lagi perempuan korban kekerasan PMI ataupun anak-anak PMI yang dimanfaatkan oleh penjahat seks (pedofilia)," kata dia.

Selama proses pembuatan Perdes PMI ini, pihaknya sebagai dinas mengaku akan terus mendampingi dan mendorong para pejabat desa dalam menggali substansi penting. Hingga saat ini, ada setidaknya 6.000 PMI yang ada di wilayah Tulung Agung.

"Nanti kita bersama-sama dalam workshop (Perdes PMI)," pungkasnya.

(Artikel ini merupakan bagian dari Fellowship yang Diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) dan mendapatkan dukungan dari International Labour Organization (ILO))

# Derita Pekerja Migran di Negeri Seberang



▶ Praditya Wibby/Serat.id/12 November 2021

## ***Mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik hingga tak menerima upah***

KISAH ini diceritakan seorang mantan pekerja migran dengan samaran Amara, mengenai kehidupan di negeri rantaui Singapura pada tahun 1999 lalu. Kala itu suatu malam di Kota Jurong East, sekitar pukul 10 waktu Singapura, pada sebuah apartemen lantai 15 saat Amara bermaksud melepas lelah.

Amara tak menyangka saat itu ia menghadapi pelecehan seksual dari sang majikan yang memanggilnya. "Saat saya menghampiri, tepat disamping ranjang, lengan kanan saya dengan cepat dicengkram, kemudian ditarik, dipaksa memegang alat vitalnya," cerita Amara kepada Serat.id Rabu, 3 Oktober 2021.

Spontan Amara menolak dia harus berhadapan antara paksaan dan rasa takut, dia meninggalkan majikanya. "Saat itu saya takut dan gemetar," kata Amara menambahkan.

Di dapur malam itu menjadi tempat dia meredakan trauma, seiring dengan air matanya, Amara menangis. Rasa takut dan bimbang menyelimuti perasaan Amara di malam itu.

Saat bekerja di Singapura, perempuan asal Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah itu bekerja masih berusia 18 tahun. Namun oleh agen pemberangkatan mengganti identitas menjadi 21 tahun, agar dapat berangkat ke luar negeri.

Usianya yang masih muda menghadapi kejadian tak mengenakan sendirian dilalui selama dua bulan. Di apartemen itu ia tidur di kursi kayu hanya untuk bersandar tanpa bisa remahan. Ia juga tak punya kamar untuk menutup privasinya saat bekerja.

"Tak ada rasa nyaman dan aman, hanya ketakutan yang aku rasakan," kata Amara menjelaskan.

# DERITA PEKERJA MIGRAN DI NEGERI SEBERANG



Rasa cemas tidak berani ia ceritakan kepada majikan perempuan, ia khawatir justru menjadi salah paham, apa lagi majikan perempuan tidak suka dengan dirinya.

Hingga akhirnya sekitar dua bulan setelah kejadian itu, Amara memberanikan diri melaporkan ke anak majikan yang pertama, saat datang ke apartemen. Amara menyatakan tak kerasan bekerja di keluarga itu.

Oleh anak majikan menghubungi agen usai mendengarkan keluhan Amara, agen tersebut kemudian meminta majikan agar tidak menyuruhnya membantu saat buang air besar, Amara juga berhak mendapatkan tempat tidur yang layak.

Akhirnya Amara dapat merasakan tidur di atas kasur di kamar majikan perempuan. Sedangkan majikan perempuan tidur dengan majikan pria.

Ia juga sempat berpindah bekerja di anggota keluarga lain menjadi pengasuh bayi dan membersihkan rumah.

Amara bekerja dua tahun di Singapura sesuai dengan masa kontrak, ia enggan memperpanjang pekerjaanya yang penuh resiko pelecehan, memilih pulang ke kampung. Kini Amara hidup di kampung halamannya, membuka jasa jahitan baju untuk membantu perekonomian keluarga.



## **Tak ada rasa nyaman dan aman, hanya ketakutan yang aku rasakan**

Arab Saudi, Riyadh pada 1998 lalu. "Awalnya itu ada agen atau calo yang datang ke rumah saya. Terus menawarkan kerja di luar negeri, di Arab," kata Agnes mengawali cerita.

Agnes bisa ke Arab Saudi setelah identitasnya usianya dimanipulasi menjadi 21 tahun. Setelah menunggu tiga bulan di penampungan bekerja di sebuah rumah majikan di Kota Riyad.

Namun kisah penyiksaan mulai terjadi muncul ketika suatu pagi saat Agnes menyapu halaman depan rumah, tiba-tiba sepucuk surat yang dilempar dari arah rumah tetangga dan jatuh tepat di depan Agnes.

"Saya kaget itu. Kemudian saya ambil dan baca, tapi belum sampai selesai membaca, surat itu direbut majikan perempuan yang datang dari arah belakang saya," kata Agnes .

Meski belum seelai membaca surat tersebut, namun Agnes sedikit memahami isinya yang intinya mohon bantuan agar memberikan nomor KBRI, karena pekerja rumah tangga tetangganya mengalami kekerasan dan telah bekerja selama 15 tahun tanpa gaji.

"Saya kepikiran dan sedih. Kasihan, tapi saya tidak bisa membantunya," kata Agnes menjelaskan.

Sialnya majikan Agnes justru marah dan mencaci dia usai mendatangi tetangganya. Agnes selalu selalu dianggap salah dalam mengerjakan sesuatu. "Kerjaan saya selalu salah. Lalu saya dipukul, tangan saya dipelintir. Pernah punggung saya dipukul menggunakan vacuum cleaner, wajah saya juga pernah sampai lebam dibagian sekitar mata kanan," kata Agnes mengisahkan penyiksaan .

Tak hanya itu, pada suatu sore, saat Agnes sedang menyeterika baju di kamarnya, adik laki-laki majikan memanggil. Saat Agnes hendak beranjak menghampiri, adik majikan itu sudah di depan kamar Agnes dan hendak menarik paksa tangan Agnes.

"Pas tangan saya mau ditarik, saya langsung buru-buru masuk kamar lagi dan saya kunci, sampai majikan laki-laki saya pulang kerja," katanya.

Pelecehan seksual yang menimpa Agnes juga dialaminya saat dia pergi ke warung dekat rumah, saat hendak membeli sayur. Seorang penjaga warung menggoda dengan raut wajah genit, seolah-olah mengajaknya berkencan.

Tak hanya itu, sore hari saat Agnes sedang membersihkan kaca jendela ruangan depan, seorang yang tak ia kenal, membuka celana dan memamerkan alat kelaminya di depan jendela yang sedang Agnes bersihkan.

Pelecehan dirasakan tak hanya sampai di situ. Pernah suatu siang saat mengantar kopi untuk adik majikan yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di ruang tamu. Ternyata mereka sedang menonton film porno, agnes dipaksa menonton, dan pintu ruang tamu itu hendak dikunci. Beruntung agnes berhasil keluar.

Hampir satu tahun Agnes bekerja penuh kekerasan fisik dan psikis, hingga wajah lebam. Ia merasa tak sanggup lagi dan memutuskan pergi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk mengadukan perlakuan tak pantas yang dialaminya.

"Itu pagi hari, saya jalan kaki dari rumah majikan ke KBRI. Tapi pas di tengah jalan, saya dijemput majikan laki-laki. Gak tahu ya, mungkin ada yang lihat saya pergi jalan kaki, terus laporan sama majikan saya," terangnya.

Di dalam mobil, majikanya melihat wajah Agnes yang lebam, dan tak banyak tanya tentang apa yang dialaminya. Sesampainya di KBRI, Agnes dengan semangat ingin bertemu staff dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Namun sayangnya dia hanya dapat menemui seorang supir yang kebetulan warga Indonesia.

Kepada supir KBRI itu Agnes pun menceritakan segala kejadian yang dialaminya itu. Sang supir yang telah lama kerja di Arab Saudi itu, kemudian menjelaskan persoalan Agnes kepada majikanya yang mendampingi.

Mengetahui persoalan pekerja rumah tangganya, majikan Agnes meminta maaf atas perlakukan keluarganya kepada Agnes.

Nasib yang dialami Amara juga dirasakan Agnes, bukan nama sebenarnya. Perempuan masih satu kecamatan dengan Amara itu sebelumnya mengadu nasib ke Arab Saudi saat masih berumurnya 17 tahun.

Dia menjadi pekerja rumah tangga di Ibu Kota

Sesampainya dirumah, majikannya itu membahas persoalan yang dialami Agnes bersama istri dan adiknya itu. Setelah percakapan itu, Agnes tak lagi mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.

Namun satu tahun setelah obrolan tersebut, Agnes kerap mendapat potongan gaji karena kesalahan yang tak diperbuatnya.

Dua tahun derita dialami Agnes berakhir, ia diperbolehkan pulang ke Indonesia. Ironisnya tanpa membawa uang dari jerih payah di negeri Ka'bah itu. "Waktu itu, saya dengar sendiri, majikan saya menitipkan uang kepada adiknya, dan memintanya untuk mengantarkan saya ke Bandara," kata Agnes.

Namun harapan pulang kampung dengan membawa sejumlah uang pun pupus. Pasalnya sang adik majikan itu tak memberikan uang hasil keringat Agnes.

"Pas sampai di Bandara, adik majikan saya itu bilangnya nanti uangnya saya transfer aja, dari pada hilang," katanya.

Cerita dialami Amara dan Agnes sebagai pekerja migran itu bukan berarti selesai di tahun itu, catatan Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI, derita para pekerja di negeri asing terus terjadi.

Asisten Departemen Pengarsipan, SBMI, Anita Yuniarti mengatakan dalam kurun waktu 2012 hingga 2021 ada 70 kasus kekerasan seksual yang dialami PMI. Kebanyakan Pekerja Rumah Tangga ada 33 pengaduan, Caretaker 1 pengaduan, Caregiver 8 pengaduan, pekerja Spa 5 aduan dan perkebunan 1 pengaduan.

"Selain itu ada modus pengantin pesanan sebanyak 22 pengaduan," kata Anita.

Anita mengatakan pekerja migran Indonesia seharusnya terlindungi dengan adanya Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia.

"Namun nyatanya kejadian ini banyak dialami para perempuan pekerja migran," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menyayangkan terjadinya kekerasan yang dialami para pekerja migran di tempat kerja.

"Pastinya saya turut prihatin, dan berharap tidak terjadi lagi kejadian tersebut," kata Sakina.

Ia meminta agar calon pekerja migran mentaati prosedur kerja dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI.

"Pekerja migran ini juga bisa berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau dengan Konsulat Jendral Republik Indonesia di negara setempat," kata Sakina menjelaskan.

Menurut dia, Disnakertran Jateng selalu berupaya melakukan pengawasan kepada pekerja migran asal Jawa Tengah, di antaranya membentuk Satuan Petugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Untuk itu kami bersinergi dengan Polda Jateng, Devisi Imigrasi Kanwil, Kementrian Hukum dan HAM Jateng dan BP2MI Semarang," katanya. (\*)

# Derita Pekerja Migran, Tersiksa di Tepat Kerja Gangguan Mental Saat Kembali



▶ Praditya Wibby/Serat.id/12 November 2021

***Seharusnya pemerintah menerbitkan aturan sebagai turunan undang-undang nomor 18 tahun 2017, agar dapat dioperasionalkan dan meratifikasi Konvensi International Labour Organization atau ILO 189 tentang kerjalayak PRT***

DIREKTUR Legal Resource Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau LRC-KJHAM, Nur Laila Hafidhoh menyatakan, kekerasan seksual yang dialami para perempuan pekerja migran adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual ada yang mengalami gangguan kesehatan mental saat kembali di kampung halaman.

"Pada 2019, LRC-KJHAM melakukan Feminist Participatory Action research atau FPAR bersama 29 perempuan pekerja migran di Kabupaten Grobogan. 16 di antaranya mengalami kekerasan seksual," kata Nur Laila.

Menurut dia, para pekerja migran ini seharusnya mendapatkan hak atas akses informasi tentang hak-haknya sebagai perempuan pekerja migran. Termasuk hak kesehatan, keselamatan di tempat kerja, keadilan.

"Termasuk hak untuk terbebas dari diskriminasi, kekerasan seksual dan hak untuk berserikat, juga hak untuk ibadah," kata Nur Laila menambahkan.

Nur Laila mengatakan, yang bisa dilakukan pekerja migran agar bisa mengantisipasi ancaman saat bekerja dengan cara mempelajari informasi tentang hak-hak dirinya pekerja, kemudian mencari informasi tentang serikat pekerja migran di negara tujuan.

"Mereka juga dapat menyimpan nomor-nomor penting untuk bantuan jika terjadi kasus, lalu melaporkan kasusnya ke lembaga-lembaga pengaduan kasus," kata Nur Laila menjelaskan.

Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Tiasri Wiandani mengatakan lemahnya pengawasan dan perlindungan pada PMI memang sudah terjadi sejak dari proses perekrutan, pemberangkatan, sampai penempatan di negara tujuan.

Hal itu menjadi ironi, meski regulasi yang dapat melindungi, pemenuhan perlindungan pada Pekerja Migran telah diterbitkan lewat undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Komnas Perempuan memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia agar menyegearkan perlindungan komprehensif dengan melaksanakan UU nomor 18 tahun 2017," kata Tiastri.

Ia mengatakan seharusnya pemerintah menerbitkan aturan turunan undang-undang agar dapat dioperasionalkan dan meratifikasi Konvensi International Labour Organization atau ILO 189 tentang kerja layak PRT.

Selain itu ia mendorong pemerintah dan DPR agar segera melakukan langkah-langkah konkret untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

"Pemerintah Indonesia juga harus melakukan perbaikan perjanjian dengan Negara Tujuan Kerja atau Bilateral Agreement, kemudian penguatan pendataan calon PMI dan PMI dari tingkat desa sampai tingkat pemerintah pusat," katanya.

Tiasari berharap agar Pemerintah membuat mitigasi dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap PMI dan penghapusan hukuman mati di produk hukum domestik. (\*)

# Derita PMI Hong Kong Tidur Sekamar Bersama Majikan



► Suci Sekarwati/Tempo/11 November 2021

***Lahir dan hidup di salah satu kampung yang banyak 'melahirkan' pekerja migran serta hidup bersama orangtua dan saudara yang bekerja sebagai pekerja migran, membuat kami terbiasa dengan persoalan yang menimpa mereka. Banyak perempuan yang mengalami pelecehan dan kekerasan.***

TEMPO.CO, Jakarta - RUANG tamu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Pancoran, Jakarta, pada Rabu siang, 20 Oktober 2021, terlihat sepi. Deretan kursi di ruang tamu, kosong. Figo Paroji, staf bidang Media dan Komunikasi SBMI, sambil menyesap kopi panas menceritakan ruang tamu itu pernah penuh sesak oleh para pekerja migran Indonesia (PMI) yang sedang menunggu keadilan bagi kasus hukum yang mereka alami.

Salah satu dinding ruang tamu kantor SBMI, ditempeli spanduk raksasa bertuliskan Serikat Buruh Migran Indonesia beserta logonya. Ada satu rak penuh buku di ruang tamu itu.

Wahyuni, 41 tahun, keluar dari sebuah ruangan di kantor SBMI menyambut Tempo. Pada 2015 – 2016, Eka pernah mengadu nasib ke Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga (PRT).

Pada empat bulan pertama, Eka bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang bertugas menjaga satu anak dan seorang nenek. Namun kontraknya diputus sepihak.

Eka lalu ditawari oleh agen penggerah tenaga kerja di Hong Kong untuk bekerja menjaga seorang lansia. Yang membuat Eka melongo, lansia tersebut seorang laki-laki dan mereka akan tidur dalam satu tempat tidur yang sama (ranjang bertingkat).

Di Indonesia, majikan laki-laki dan pekerja rumah tangga yang bukan muhrim, lalu tidur dalam kamar yang sama, adalah hal yang tidak wajar. Untuk meyakinkan dirinya, Eka bertanya satu hal pada anak majikan, apakah ada



jaminan kalau majikan laki-laki yang akan dirawatnya itu, tidak akan berbuat kurang ajar padanya. Anak majikannya pun langsung menyanggupi.



***Kawan saya menolak (dicium) yang berakibat dia di putus kontrak secara sepihak***

"Kalau ayah saya colak-colek, langsung kabari saya. Saya akan tanggung jawab," kata Eka menceritakan kesepakatan dia dengan anak majikan sebelum tanda-tangan kontrak kerja.

Awalnya, Eka gugup dan waswas. Tidur berdekatan dengan majikan, jelas hal yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Apalagi di apartemen yang sempit itu (3 x 7 meter), hanya ada dia dan sang kakek.

"Anak-anak kakek, tinggalnya berjauhan. Mereka hanya datang ke rumah kalau saya minta libur," kata Eka.

Orang tua Eka di Magetan, Jawa Timur, ikut gelisah anak perempuannya satu kamar dengan majikan laki-laki. Namun Eka memberi penjelasan, mereka tidur di ranjang tingkat, kakek di tempat tidur bagian bawah dan dia di atas.

Ranjang atas itu, juga menjadi tempat bagi Eka meletakkan pakaian dan barang pribadinya. Sebab dia tidak diberi fasilitas lemari penyimpanan. Prihatin memang, namun Eka dan keluarga akhirnya menerima kondisi tersebut.

Eka menceritakan kakek yang dirawatnya sakit stroke hingga lumpuh separuh badan. Setiap mau bergerak, kakek harus dibantu. Mandi hingga buang air besar pun dibantu oleh Eka.

Badan kakek cukup besar, tinggi 170 cm dan berat 80 kilogram. Eka ngos-ngosan setiap kali membantunya bergerak.

Tantangan lain yang harus dihadapi Eka, yakni satu kamar dengan kakek. Apartemen yang mereka tempati adalah yang tersempit di Hong Kong, yakni sekitar 3 x 7 meter. Tak ada sekat. Satu-satunya ruang tertutup hanya kamar mandi.

Walhasil, setiap hendak telepon keluarga, Eka tak bisa bersuara keras karena akan mengganggu si kakek. Ganti baju hanya bisa dilakukan di dalam kamar mandi, kerja nyaris 24 jam karena kakek bebas membangunkannya setiap kali dibutuhkan. Ketika ada tamu, Eka berdiri di pojok dapur karena tak ada ruangan lain.

"Yang saya syukuri ketika itu, kakek enggak colak-colek. Tidak ada pelecehan seksual," kata Eka.

PMI lainnya di Hong Kong, D.M. Ratih, 31 tahun, punya cerita berbeda. Dia pernah bekerja pada sebuah keluarga yang terdiri dari satu kakek, satu anak laki-laki kakek dan dua cucu laki-laki kakek. Dengan begitu, Ratih adalah satu-satunya perempuan di apartemen itu dan dia terpaksa tidur di ruang tamu karena kamar di apartemen itu hanya ada dua.

Ratih tidur di ruang tamu yang hanya diberi sekat kain korden. Ruang tamu tersebut merangkap sebagai ruang menonton TV. Walhasil, jika keluarga majikannya menonton acara pertandingan sepak bola pada dini hari, Ratih tak bisa tidur karena bising suara televisi.

Kendati penuh keterbatasan dan tantangan, yang membuat Ratih bertahan adalah keluarga majikan menghormatinya. Tidak ada yang berani melakukan tindakan senonoh padanya.

Eka dan Ratih boleh dibilang cukup beruntung selamat dari tindak pelecehan seksual di tengah kondisi tak adanya ruang privacy. Gendis, 40 tahun, PMI perempuan di Hong Kong, menceritakan pengalaman yang dialami rekan sejawatnya.

Lantaran tak punya kamar sendiri, temannya mengalami tindak pelecehan seksual dari kakak majikan. Korban yang tak mau dipublikasi identitasnya, dicium saat sedang tidur.

"Kawan saya menolak (dicium) yang berakibat dia di putus kontrak secara sepihak," kata Gendis, yang tak mau ditulis nama lengkapnya. Kasus pelecehan seksual ini tidak dilaporkan ke pihak berwenang oleh korban.

Gendis menceritakan, PMI perempuan tidur dalam satu kamar dengan majikan bukan hal yang baru. Pasalnya, rumah di Hong Kong memang sempit-sempit.

PMI perempuan ada yang tidur di sofa ruang tamu, satu ranjang dengan majikan (tempat tidur tingkat), satu kamar dengan anak majikan yang diasuh, bahkan ada yang tidur di sela-sela mesin cuci dan kolong meja makan.

## Harga properti mahal

Harga properti di Hong Kong adalah yang termahal di dunia. Dengan harga rata-rata rumah 19,4 kali lebih besar dari rata-rata pemasukan masyarakat Hong Kong.

Hong Kong memiliki populasi 7,5 juta jiwa dengan luas wilayah 1.106 km<sup>2</sup>. Wilayah Hong Kong tersebut, harus dibagi antara pemukiman warga, kawasan hijau, taman, hutan dan lahan basah.

Setiap kali ada rencana pembangunan di Hong Kong, hampir selalu mendapat penolakan dari kelompok pecinta lingkungan hidup.

Sejak Hong Kong diserahkan oleh Inggris ke Cina pada 1997, otoritas Hong Kong telah berusaha menyediakan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat Hong Kong, kendati memiliki rumah sendiri masih menjadi mimpi sulit digapai oleh banyak warga Hong Kong.

Reuters mewartakan Hong Kong saat ini juga mengalami krisis kekurangan lahan parkir kendaraan. Walhasil, biaya parkir di Hong Kong pun sangat mahal. Media setempat mewartakan, The Peak, yakni sebuah kawasan perumahan di Hong Kong yang sedang dibangun, menjual sebuah lahan parkirnya senilai HK\$10,2 juta (Rp 1,1 triliun).

Sebagai bagian dari upaya mengatasi kebutuhan perumahan bagi masyarakatnya, Hong Kong berencana membangun sejumlah pulau buatan, yang diperkirakan menelan biaya setidaknya HK\$ 624 miliar (Rp 1.136 triliun). Mengingat masih tingginya permintaan rumah, maka berinvestasi bidang real estate di Hong Kong masih menjadi investasi yang paling aman di sana.

## Perlindungan PMI

Menanggapi kondisi lingkungan PMI perempuan di Hong Kong, yang bahkan harus tidur sekamar dengan majikan laki-laki karena properti yang sempit, Judha Nugraha Direktur Perlindungan WNI dan BHI dari Kementerian Luar Negeri RI mengatakan majikan wajib menyediakan kamar sendiri untuk PMI di sektor domestik

"Sudah seharusnya majikan menyediakan kamar tersendiri untuk menjaga privacy pekerja migran sektor domestik. Silakan, PMI bisa melaporkan kondisi tersebut kepada KJRI Hong Kong untuk dapat ditindaklanjuti dengan otoritas



## **Sudah seharusnya majikan menyediakan kamar tersendiri untuk menjaga privacy pekerja migran sektor domestik. Silakan, PMI bisa melaporkan kondisi tersebut kepada KJRI Hong Kong untuk dapat ditindaklanjuti dengan otoritas setempat**

menanggapi kondisi PMI yang tak punya kamar sendiri, bahkan ada yang sampai harus tidur di toilet. Joy, mantan PMI Hong Kong, yang tak mau disebut nama lengkapnya, mengunggah sebuah video ke akun YouTube-nya pada 4 Januari 2019, mengenai komentar majikannya bernama Tong, soal video viral PMI perempuan tidur di toilet.

"Memang sih tempat terbatas, tapi haruskah di toilet? Ada orang mengakali (keterbatasan ruang) dengan membuat tempat tidur tingkat. Mungkin majikan itu (yang meminta PMI tidur di toilet) tidak suka dengan pekerja rumah tangga (PRT) tersebut, jadi disuruh tidur di toilet," kata Tong, yang hanya ingin ditulis nama marganya saja.

Menurut Tong, tidak ada orang yang mau tidur di toilet, tidak nyaman. Kalau pun bener-bener tak ada tempat untuk seorang PMI tidur, mungkin bisa di dapur.

Sedangkan Joy menyebut hal paling menyebalkan saat mengadukan kondisi ini ke agen penggerah tenaga kerja adalah mereka tidak mengambil tindakan apapun atau pasrah karena kondisi properti Hong Kong yang memang sempit.

Menurut Joy, ketika seorang PMI terpaksa harus tidur di toilet karena rumah majikan yang sempit, maka tidak ada solusi lain selain ganti majikan. Sebab mengadu ke KJRI Hong Kong, menurut Joy, kadang kurang ditanggapi.

"Mereka (KJRI Hong Kong) sibuk entah ngurusin apa, heran saya juga. Percuma. Tanggapan lama," kata Joy pada Tempo.

Sedangkan Ratih mengatakan, PMI pemula atau yang baru pertama kali tiba di Hong Kong umumnya tidak tahu kondisi rumah majikan, yang kadang suka tidak sesuai dengan gambaran yang termaktub di kontrak. Namun PMI yang sudah beberapa bulan di Hong Kong, bisa datang langsung untuk melihat kondisi rumah calon majikannya.

Untuk menghindari pelecehan seksual dari majikan karena ruangan kerja yang sempit atau tanpa sekat, Ratih menyarankan para PMI perempuan memperhatikan cara berpakaian, etika dan cara menyapa majikan (tidak dengan suara manja). Bukan hanya itu, PMI pun diminta untuk aktif ikut komunitas supaya bertambah pintar. Ratih sendiri saat ini melanjutkan sekolah di Universitas Terbuka, disela kesibukannya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong.

Adapun Gendis menyarankan kepada sesama PMI perempuan di Hong Kong agar memahami isi kontrak sebelum menandatanganinya. Tanyakan apa yang tidak tahu, tanyakan fasilitas apa yang didapatkan, tanyakan PMI tersebut tidur dengan siapa, jam berapa harus bangun tidur, bagaimana pengaturan makan PMI sampai hak untuk charger ponsel (karena menggunakan listrik yang dibayar majikan).

"Jangan takut dibilang pemilih sama agen. Sebab agen akan berpegang pada apa yang termaktub di kontrak," kata Gendis.

Dalam Konvensi ILO 189 termaktub bahwa pekerja rumah tangga berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat (Pasal 13) dan berhak atas kondisi hidup layak yang menghormati privasi pekerja (Pasal 6). Konvensi ILO itu menekankan pula adanya kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan majikan atau calon majikan mereka apakah akan tinggal di rumah tangga tersebut ataukah tidak (Pasal 9).

Bekerja dalam satu apartemen mungil, bahkan satu kamar dengan majikan, lebih banyak membawa mudarat bagi PMI di sektor domestik. Namun apa yang membuat mereka bertahan? Eka menjawab singkat, desakan ekonomi.

*Artikel ini bagian dari workshop jurnalistik, hasil kerja sama AJI Jakarta dengan ILO, yang mengusung tema "Sensitivitas Gender dan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Migrasi Tenaga Kerja dan Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Perempuan"*

setempat," kata Judha kepada Tempo, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Tempo telah melayangkan surat permohonan wawancara ke Kedutaan Besar Cina di Jakarta soal kondisi yang dialami PMI, namun tak berbalas hingga 11 November 2021. Pesan yang dikirim ke staf Kedutaan Besar Cina juga tak direspon.

Lalu, bagaimana warga Hong Kong menanggapi kondisi PMI yang tak punya kamar sendiri, bahkan ada yang sampai harus tidur di toilet. Joy, mantan PMI Hong Kong, yang tak mau disebut nama lengkapnya, mengunggah sebuah video ke akun YouTube-nya pada 4 Januari 2019, mengenai komentar majikannya bernama Tong, soal video viral PMI perempuan tidur di toilet.

# Neraka Pekerja Migran Indonesia di Pandemi Malaysia



► Abdus Somad/Suara.com/15 November 2021

***Migrant Care mencatat, selama pandemi Covid-19 sebanyak 5.000 pekerja migran Indonesia (PMI) masih dipenjara tanpa alasan di Malaysia. Padahal masa tahanan mereka telah habis.***

***Mereka mendapatkan perlakuan buruk. Diintimidasi, dicaci maki, disiksa hingga dilecehkan oleh para petugas. Tak sedikit dari mereka mengalami trauma hingga depresi berat dalam masa penahanan. Mereka berharap pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan.***

SITI dan Anton—bukan nama sebenarnya—langsung menyantap sarapan usai tiba di tempat kerja mereka sekitar pukul 10 waktu setempat, 7 Juli 2020. Pasangan suami istri atau pasutri ini bekerja di sebuah restoran kawasan Kuala Lumpur, Malaysia. Di tengah menyuap makanan, lima Polisi Diraja Malaysia atau PDRM menyeruak masuk ke dalam restoran seraya menghampiri para pekerja.

Siti dan Anton (31) yang saat itu duduk di belakang restoran terhenyak. Polisi meminta semua pekerja untuk berkumpul dan menyerahkan dokumen izin kerja serta paspor. Siti menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh kepolisian. Menyadari izin kerja Siti dan Anton sudah berakhir sejak Maret 2020, petugas menginterogasi mereka di tempat. Setelah itu, mereka dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil tahanan dalam keadaan tangan diborgol. “Saat ditangkap saya kepikiran anak,” kata Siti kepada Suara.com, Jumat, 22 Oktober 2021.

Saat berada di mobil Polisi, Siti mengaku diminta uang 1.500 RM (Ringgit Malaysia) setara dengan Rp 5 juta sebagai jaminan ia tak akan ditahan. Saat itu ia hanya membawa 1.000 RM atau kisaran Rp 3,5 juta. Semua uang itu diserahkan kepada polisi.

Alasan mempunyai dua anak menguatkan Siti tak ditahan. “Polisi bilang bisa bebas (suami-istri) dengan jaminan 3.000 RM tapi harus masuk penjara 14 hari,” kata Siti mengingat peristiwa saat itu.



Pasutri ini hampir 12 tahun bekerja di negeri Jiran. Siti merupakan PMI asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia berangkat ke Malaysia sejak 2006. Ia memutuskan kembali ke Indonesia pada 2008 karena masa izin kerjanya sudah berakhir.

Lantaran tak ingin lama menganggur, Siti memutuskan untuk berangkat lagi ke Malaysia dengan izin kerja sebagai juru masak. Sementara Anton merupakan PMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia berangkat ke Malaysia pada 2008. Keduanya memutuskan untuk menikah pada 2012 di Malaysia.

Pemberlakuan karantina nasional melalui Aturan Kontrol Pergerakan (MCO) oleh Pemerintah Malaysia sejak Maret 2020, penyebab Siti dan Anton sulit mengurus perpanjangan izin kerja. Layanan mengurus perpanjangan masa izin kerja untuk PMI ditutup.

Pikir Siti, pemerintah Malaysia akan memberikan keringanan bagi PMI yang belum memperpanjang izin kerjanya berupa tetap membolehkan PMI untuk bekerja. "Baru mati beberapa bulan saja langsung kena tangkap padahal paspor kami masih hidup," ujar Siti.

Siti berujar, suaminya dicecar sejumlah pertanyaan seputar izin bekerja. Mereka mengaku dibentak karena dianggap pekerja yang tidak patuh pada kebijakan pemerintah Malaysia.

Selama proses pemeriksaan Anton tidak mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah Indonesia. Anton lantas dibawa ke penjara Hentian Kajang, Selangor sembari menunggu proses pengadilan. "Saat itu orang Indonesia hanya kami, tiga dari Myanmar," ungkap Siti.

Tidak sampai dua pekan, semua berkas Anton dinyatakan lengkap dan siap dibawa ke Mahkamah Kuala Lumpur. Dalam persidangan Anton divonis 40 hari penjara.

Setelah menjalani hukuman 40 hari, Anton tak langsung menghirup udara segar. Ia tetap ditahan. Siti yang mendengar itu mengaku linglung sebab putusan mahkamah tidak dipatuhi pihak Imigrasi. "Sepatutnya kan dia lepas dari masa tahanan itu 13 Agustus 2020," kata Siti.

Mereka tak melawan. Awal Desember 2020, Siti mendapatkan telepon dari Imigrasi. Ia diberitahu bahwa suaminya boleh pulang dengan ketentuan keberangkatan pulang ditanggung oleh pekerja. Siti menuruti permintaan itu, ia kemudian membelikan tiket pesawat dengan keberangkatan Kuala Lumpur ke Jakarta.

Saat tiket hendak diserahkan kepada suaminya, Siti mendapat kabar dari petugas, suaminya tak boleh pulang karena dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes Polymerase Chain Reaction (PCR). "Jadi tiketnya hangus, kalau mau refund Air Asia minta bukti pernyataan positif Covid-19, saya minta ke imigrasi, tapi tidak bisa," kata Siti.

Menurut Siti, suaminya sempat dibawa ke rumah sakit untuk proses penanganan Covid-19 meskipun kondisinya tidak bergejala seperti batuk, pilek, maupun demam. Sepulang dari Rumah Sakit, pada 20 Desember 2020, suaminya dibawa lagi ke detensi Hentian Kajang untuk menjalani karantina.

Tak sampai dua pekan, Anton dipindahkan ke penjara Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Januari 2021 tanpa ada pemberitahuan apa pun. Siti pun tidak tahu apa sebab suaminya dipindah ke dentensi yang berada di Jalan Alam Sutera Utama.

Siti yang penasaran dengan kondisi suami ingin menjenguk suami yang telah berpisah hampir satu tahun. Petugas imigrasi melarang dengan alasan masih dalam situasi pandemi. Satu-satunya cara Siti mengetahui suaminya hanya melalui saluran telepon yang disediakan oleh petugas. Samar-samar, Siti mendengar bahwa Anton alami kekerasan fisik dan psikis selama berada di bui. "Di Detensi Kajang tidak pernah mukul tapi di Bukit Jalil itu dipukul bagian kaki sampai tidak bisa jalan," kata Siti menceritakan ulang kisah suaminya.

Suara.com mencoba menghubungi Anton melalui saluran telepon. Ia sudah berada di kampung halaman. Ia membenarkan pernyataan Siti. Kata Anton, di Detensi Bukit Jalil, pekerja diperlakukan tidak manusiawi, seperti lauk berupa ayam dan ikan untuk makan sudah basi, air minumnya seperti tak dimasak, dan tidur tanpa alas. Bahkan untuk mandi, Anton harus bergantian menggunakan sabun untuk 15 pekerja. "Kami juga dibentak, dipukul, dan dimaki," kata Anton.

Anton dipukul pada tangan dan kaki menggunakan rotan dan selang air. Pukulan itu membuat tangan dan kakinya membiru. Akibatnya, Anton sulit berjalan selama tiga hari. "Sementara tangan saya sampai biru dan terus gemetar," ucap Anton.

Anton juga mengaku sering dipindah-pindah blok tanpa sebab. Awal masuk ia berada di blok A, lalu dipindah ke blok B, C, dan D. "Padahal masa tahanan saya sudah habis. Sepatutnya sudah bebas" katanya.

Pada Juni 2021, petugas menyampaikan kepada Anton dan beberapa pekerja asal Indonesia perihal kepulangan ke Indonesia. Ada dua opsi yang ditawarkan petugas imigrasi, pertama membeli tiket pesawat lewat petugas dengan harga 2.500 - 3.000 RM atau setara dengan Rp 8-10 juta. Uang tersebut harus dikirim ke rekening pribadi petugas imigrasi.

Kedua, membeli tiket sendiri tanpa diurus petugas. Mendengar itu, Anton menghubungi Siti agar membelikan ia tiket pulang ke Indonesia. Lantaran tak mempunyai uang, Siti memilih untuk membeli tiket pesawat sendiri dengan harga Rp 450 ribu pada 21 Juni 2021.

Nasib buruk datang lagi. Ketika tiket sudah dibeli, Siti kembali mendapat kabar bahwa suaminya positif untuk kedua kalinya.

"Saya record dua kali positif," ujar Anton. Belakangan Anton menyadari rekan-rekannya yang membeli tiket di luar petugas imigrasi juga dinyatakan positif. "Kalau beli di luar semua positif," lanjutnya.

## Perlakuan Tak Manusia

Jauh sebelum kekerasan dialami oleh Anton, pekerja asal Bekasi, Hayati (bukan nama sebenarnya) kerap mendapat perlakuan serupa Anton. Pada Desember 2019, ia bersama enam rekannya ditahan karena dianggap kabur dari lokasi kerjanya.



***Tidak sedikit perempuan asal Indonesia yang ditahan di Detensi Semenyeh mengalami kecemasan yang berlebihan. Akibatnya, pekerja perempuan alami depresi dan stres berat. "Banyak yang menangis di tahanan. Saya ini PMI berdokumen, bukan nonprosedural, kenapa saya diperlakukan begitu.***

Hal itu dilakukan Hayati untuk mengadu ke Duta Besar RI di Malaysia lantaran majikannya tidak membayar upah sesuai dengan kontrak. Selain itu, uang lembur pun tak pernah dibayarkan selama satu tahun bekerja. "Kalau kita bermasalah kami dikurung majikan," ujar Hayati, Kamis, 21 Oktober lalu.

Hayati mengaku ditahan di Blok A Detensi Semenyeh, Malaysia selama satu bulan. Pengamatan Hayati, di blok A terdapat 300



pekerja dari berbagai negara. Selama ditahan, Hayati mengaku alami penyiksaan dan kekerasan.

Ia mengungkapkan, perempuan hanya boleh membawa dua baju dan dilarang membawa pembalut. "Kalau datang bulan darahnya berceciran," kata Hayati.

Kejadian itu masih sulit melupakan. Bahkan ketika pekerja sakit, petugas tidak memberikan obat. Alih-alih mengobati, petugas justru menyiram pekerja dengan air. "Obat susah didapat," katanya.

Kata Hayati, tidak sedikit perempuan asal Indonesia yang ditahan di Detensi Semenyeh mengalami kecemasan yang berlebihan. Akibatnya, pekerja perempuan alami depresi dan stres berat. "Banyak yang menangis di tahanan. Saya ini PMI berdokumen, bukan nonprosedural, kenapa saya diperlakukan begitu," ujarnya.

Koordinator Migrant Care Malaysia, Alex Ong menjelaskan selama pandemi Covid-19, pekerja migran indonesia mengalami berbagai bentuk perlakuan buruk. Pemerintah Malaysia selalu melakukan razia untuk menangkap PMI yang memiliki dokumen maupun yang tak berdokumen. "Orang Malaysia takut pekerja migran Indonesia membawa penyakit virus," kata Alex Ong kepada Suara.com melalui telepon, Rabu, 21 Oktober.

Masalah lain, PMI yang masa tahanan sudah habis kemudian diperpanjang tanpa ada alasan. Dalam pantauan Alex, terdapat 5.000 PMI yang masih ditahan. "Semestinya mereka mendapatkan perlakuan repatriasi (pengembalian ke negara asal) setelah menjalani hukuman," ujar Alex.

Penahanan tersebut, kata Alex, berdampak buruk bagi PMI perempuan, seperti sulit mendapatkan pekerjaan selepas ditahan, gangguan psikologi, hak untuk hidup tercabut, hingga perempuan yang suaminya ditahan sulit mendapatkan penghasilan untuk biaya hidup di Malaysia. "Itu kan satu pelanggaran HAM," ucap Alex.

Bagi Alex, jaminan perlindungan untuk PMI di Malaysia masih jauh dari harapan. Alex mendorong agar kedua negara lebih serius memperhatikan kondisi PMI. Menurutnya, MoU yang dibuat kedua negara seperti tidak memberikan kepastian keselamatan, keamanan, dan perlindungan kepada PMI.

Indonesia telah melakukan MoU terkait dengan jaminan keselamatan PMI pada 2012 yang diperpanjang pada 2018 lantaran masa berlaku telah habis. Kekinian, pemerintah kembali menyiapkan MoU yang akan ditandatangani pada akhir 2021. "Sibuk MoU tapi mekanisme perlindungan tidak memuaskan," kata Alex.

Komisi Nasional Perempuan mendesak pemerintah agar lebih tanggap menangani PMI yang alami kekerasan maupun penahanan berlebihan di detensi. Menurut komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, kasus seperti penyiksaan

dan permintaan uang kepada PMI dengan dalih membantu pemulangan merupakan kejahatan melanggar hukum. Ia meminta pemerintah untuk mengusut dengan tuntas. "Permintaan uang kepada PMI oleh petugas detensi merupakan bentuk pelanggaran karena menggunakan jabatan untuk meminta sejumlah uang dari PMI. Atas perlakuan tersebut harus ada upaya advokasi dari pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran tersebut," kata Tias, Selasa, 26 Oktober.

Sepanjang 2020, Komnas Perempuan telah menerima puluhan pengaduan PMI. Beberapa bentuk kekerasan yang dialami PMI di luar negeri seperti, kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), eksploitasi narkoba, dan berhadapan dengan pidana mati. Menurut Tias—sapaan akrabnya—PMI wajib mendapatkan jaminan perlakuan aman dan hidup layak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Beleid tersebut menjelaskan PMI berhak mendapatkan hak-haknya, seperti akses hukum bagi korban dan keluarga. "Dalam pemenuhan hak tersebut dapat diwujudkan dengan kehadiran negara dengan menjamin perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi PMI dan keluarganya," kata Tias.



### ***Di Detensi Kajang tidak pernah mukul tapi di Bukit Jalil itu dipukul bagian kaki sampai tidak bisa jalan***

Perempuan yang aktif di serikat pekerja ini meminta pemerintah memberikan kompensasi sesuai dengan tingkat kerugian material dan non material korban. Selain itu, Tias juga meminta agar pemerintah memberikan pemulihan bagi PMI yang alami kekerasan penyiagaan, dan praktik penahanan berlebihan. "Pemerintah harus melakukan itu," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha mengaku belum ada laporan terkait dengan kekerasan maupun permintaan uang kepada PMI di detensi di Malaysia. Pihaknya akan mendalami kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap PMI. "Kami saat ini belum menerima laporan tertulis. Kami mendorong agar PMI melaporkan kepada kami," kata Judha, Jumat, 29 Oktober.

Kementerian Luar Negeri melalui enam perwakilannya di Malaysia mengaku telah mengecek semua penjara. Dari pemeriksaan itu, Kemenlu mencatat terdapat 4.303 PMI yang masih ditahan meski proses menjalani hukuman telah selesai.

Menurut Judha, kondisi penjara mengalami over crowd. Kemenlu mendorong pemerintah Malaysia dapat menjamin keamanan dan keselamatan PMI yang ditahan. "Perlakuan dan kesiapan fasilitas yang memadai di detensi harus dijamin karena itu hak dari PMI untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dan tidak berdesakan," kata Judha.

Penanggung jawab sementara (Plt) Duta Besar Malaysia di Indonesia Adlan Mohd. Shafieq menegaskan tidak ada kebijakan permintaan uang ke PMI untuk membantu kepulangan ke Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia. Menurutnya, Malaysia hanya membantu untuk swab PCR sebelum diterbangkan ke Indonesia. "Permintaan uang itu masuk tindak pidana korupsi di Malaysia. Kiranya kami bisa diinfokan siapa pelakunya. Info ini akan kami ambil tindak sewajarnya. Hukumannya bisa penjara," ujar Adlan saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu, 6 November.

Terkait dengan praktik kekerasan dan penambahan penahanan hukuman bagi PMI di detensi, Adlan menyampaikan tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Pihak Malaysia akan mengusut kasus tersebut dengan memeriksa seluruh detensi yang ada di Malaysia.

Bagi terduga pelaku yang terbukti melakukan kekerasan, menambah hukuman, dan meminta uang, Pemerintah Malaysia, kata Adlan akan memberlakukan hukum disiplin, mulai dari pemotongan gaji, penurunan jabatan, hingga pidana penjara. "Kami akan tanyakan kepada instansi otoritas depo berkaitan mengenai penambahan tahanan. Sementara kekerasan sewajarnya tidak berlaku. Kalau ada kekerasan kami akan ambil tindakan serius dengan tindakan disiplin," tegas Adlan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri akan menyiapkan proses hukum ketika korban PMI melaporkan kasus yang dialami di detensi ke Kemenlu dan enam KBRI di Malaysia. Tanpa itu, menurut Judha, sulit bagi Kemenlu melakukan upaya hukum bagi korban. "Kami bisa menuntut sesuai dengan prosedur hukum. Kami bisa menuntut pelakunya," ungkapnya.

# Derita Pekerja Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur



► Djemi Amnifu/[www.katantt.com](http://www.katantt.com)/10 November 2021



BANYAK kisah duka dialami pekerja migran asal NTT yang menjadi korban TPPO. Tak sedikit pula yang kehilangan nyawa demi meraih mimpi menjadi pekerja migran di Malaysia. Kisah ini menjadi nestapa bagi para korban yang harus ditanggung seumur hidupnya. Seperti cerita dua perempuan AR dan SM asal Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Saat peristiwa itu terjadi tahun 2017 silam, AR dan SM masih duduk di bangku SMP.

Kisah ini diceritakan kembali orang tua kedua pekerja migran kepada media ini yang ditemui di Desa Oelatimo). "Sejak kasus itu, beta (saya Red) sudah larang AR kerja di Malaysia. Biar kita miskin tapi di sini saja. Saya masih sanggup kasih makan. Saya tidak mau, ada apa-apa lagi dengan Ani seperti dulu. Untung, mereka lari dari tempat penampungan jadi bisa pulang ke sini. Kalau tidak, saya tidak tahu lagi, apakah Ani bisa pulang atau tidak," kata Fredik Rondo, ayah AR dengan dialek Kupang.

Di dalam rumah berdinding bebek dan beratap daun alang-alang berlantai tanah, Fredik Rondo dengan telanjang dada hanya mengenakan celana pendek coklat mengatkan, sejak kasus 2017 lalu, anaknya mengalami trauma hingga kini.

Akibatnya, anaknya yang kala itu masih duduk di bangku kelas 3 SMP Oelatimo menolak untuk menyelesaikan studi. Rasa malu dan takut membuat anak pertama dari empat bersaudara ini memilih membantu kedua orang tuanya di kebun.



***Dua tahun, saya kerja percuma tidak digaji sampai akhirnya dipulangkan. Semua gaji langsung dibayar ke agency tanpa diberikan ke saya***

“Dia masih takut, jadi tidak mau lanjut sekolah. Saya juga tidak paksa dia. Jadi selama ini hanya bantu saya kerja kebun. Baru bulan lalu, AR mau ikut saudara di Kupang (Kota Kupang red) untuk bekerja di toko (pramuniaga Red). gajinya tidak seberapa yang penting dekat-dekat sini, jadi kalau ada apa-apa saya bisa langsung pi (pergi) lihat dia,” kata Fredik.

Sebagai seorang petani, Fredik bersama istrinya, Welmintje Tose, mengaku penghasilan tidak seberapa sehingga harus bekerja sampingan mengumpulkan hasil bumi lainnya seperti mengumpulkan asam dan kemiri kemudian dijual. Hasil kebun, hanya cukup kebutuhan makan sehari-hari. Itu pun masih kurang, karena ada istri dan tiga anaknya yang lain yang harus ditanggung. “Covid-19 kemarin, kita tertolong dengan bantuan dari pemerintah, kalau tidak saya tidak tahu harus kasih makan apa keluarga saya,” ujarnya.

Ada pula cerita RO, ibunda dari SM yang mengaku saat anaknya dibawa ke Medan untuk dikirim ke Malaysia. Saat kejadian itu, Rahel masih bekerja di Malaysia sebagai pekerja migran. Selama tujuh tahun bekerja di Malaysia, secara ekonomi, Rahel Olla sangat membantu kebutuhan keluarga. Termasuk membangun sebuah rumah permanen yang layak huni untuk ukuran masyarakat di Desa Oelatimo. “Waktu kejadian itu, saya tidak tahu. Nanti abis kontrak tahun 2018 pulang ke sini baru saya tahu. Karena itu, saya tidak lanjut kontrak ke Malaysia biar bisa urus keluarga. Saya juga bantu urus, SM untuk ganti saya kerja di Malaysia yang resmi,” aku Rahel Olla.

Rahel kemudian meminta SM melanjutkan pendidikan di SMP Oelatimo. Setelah tamat langsung didaftarkan sebagai calon pekerja migran di salah satu perusahaan pengirim pekerja migran ke luar negeri di Kota Kupang. Hampir setahun, anaknya menjadi pelatihan di balai latihan kerja milik perusahaan tersebut sebelum akhirnya diberangkat ke Malaysia sebagai asisten rumah tangga.

Sudah hampir dua tahun anaknya bekerja di Malaysia dengan kontrak selama dua tahun sejak 2020 dan baru berakhir Februari 2022 nanti. Selama di Malaysia, mereka saling kontak lewat telepon milik majikan karena anaknya memang tak diizinkan memegang handphone. Saat suaminya, Cornelis Missa meninggal pada April 2021 lalu, tidak diinformasikan ke SM di Malaysia. “Saya takut, kalau saya kasih tahu, nanti dia pikiran macam-macam dan minta pulang. Padahal kontraknya tinggal beberapa bulan lagi, jadi biar saya tahan-tahan diri tidak kasih tahu,” kata Rahel Olla, sambil menyeka air mata yang mengalir ke pipinya.

Rahel mengaku, kondisi ekonomi membuat dirinya dan anaknya harus bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Hasil kerja dari bertani tak bisa diharapkan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kalau pun lebih hanya mampu untuk satu dua bulan ke depan. Selebihnya, mereka kesulitan dan bertahan hidup dengan apa yang ada. “Pak lihat sendiri, kalau hanya harap kebun, tidak cukup. Apalagi untuk bangun rumah. Saya bisa bangun rumah ini hasil bekerja di Malaysia,” akunya.

Peristiwa 2017 silam yang melibatkan anaknya menjadi sebuah catatan dalam kehidupan Rahel Ola untuk mengajak keluarga lain agar menggunakan jalur resmi bila ingin bekerja di luar negeri. Informasi ini pun disampaikan pemerintah desa setempat dan pihak gereja. Memang masih ada satu dua oknum, yang secara sembunyi-sembunyi mengajak anak-anak muda bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. “Pelaku masih keluarga, mereka ini hanya mau cari untung dengan cara gampang,” katanya.

Lain lagi, dengan yang dialami pekerja migran SB, pekerja migran asal Desa Laob Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang dipulangkan dari Malaysia tanpa gaji. Selama dua tahun bekerja SB tak pernah diberi gaji karena bekerja secara nonprosedural. SB mengaku, semua dokumen atas nama dirinya di urus di Medan-Sumatera Utara oleh perekrut sebelum dikirim ke Malaysia melalui jalur laut. Sempat ditampung di tempat penampungan di Malaysia sebelum akhirnya dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di salah satu majikan di Selangor Malaysia.

“Dua tahun, saya kerja percuma tidak digaji sampai akhirnya dipulangkan. Semua gaji langsung dibayar ke agency tanpa diberikan ke saya,” akunya. Ia menyebut, kasus ini sudah dilaporkan ke aparat berwenang namun karena proses pengiriman oleh agency yang tidak dikenal sehingga sulit dilacak.

\*Liputan ini merupakan hasil Fellowship yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama International Labour Organization (ILO) dan dimonitor oleh Mustafa Silalahi.

# Sehari Tiga Jenazah Pekerja Migran Non Prosedural Asal NTT Dipulangkan dari Malaysia



► Djemi Amnifu/[www.katantt.com](http://www.katantt.com)/10 November 2021

PROVINSI Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang masih terbelenggu dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Meski berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota namun belum membawa hasil signifikan. Hampir tiap minggu, selalu saja ada pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT yang dikirim pulang baik dalam keadaan hidup atau cuman jasad saja. Kebanyakan dari mereka berstatus PMI nonprosedural.



*Saya hanya ditelepon saudara dari kampung jemput kakak Sipri (Siprianus Pake Red) di bandara kemudian bawa ke Ende pakai kapal ferry. Kalau tidak salah, sudah lama sakit lever dan baru meninggal di Malaysia*

Media ini berkesempatan mengikuti penjemputan tiga jenazah pekerja migran asal NTT dari Malaysia pada Rabu 27 Oktober 2021 di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang. Ironisnya, ketiga jenazah ini merupakan pekerja migran nonprosedural atas nama Siprianus Pake asal Desa Kurulimbu Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende Pulau Flores. Jenazah tiba pukul 09.45 Wita menggunakan pesawat Lion Air dan langsung dibawa ke kampung halamannya melalui laut menggunakan kapal ferry milik PT ASDP (Persero) Cabang Kupang.

Dua jenazah lain berasal dari Kabupaten Malaka yaitu Gasper Klau dari Desa Forekmodok Kecamatan Weliman dan Adriano Pareira dari Desa Lakekun Kecamatan Kobalima. Mereka tiba pukul 12.35 Wita menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airlines. Kedua jenazah ini kemudian dikirim langsung ke kampung halamannya di Kabupaten Malaka menggunakan dua mobil jenazah melalui jalan darat menempuh jarak sekitar 375 kilometer.

Tangis haru keluarga tak terbendung begitu peti jenazah keluar dari Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang. Peti jenazah kemudian dinaikkan ke atas mobil jenazah yang disiapkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah NTT. Sejumlah petugas Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) dari Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Keuskupan Agung Kupang ikut menjemput sekaligus mendokumentasikan pemulangan jenazah pekerja migran asal NTT ini.



Wenslaus Jando Wowa, salah seorang kerabat korban mengaku mendapat tugas membawa jenazah kerabatnya ini ke kampung halamannya. Wens demikian biasa disapa, lebih banyak diam sambil membantu mengemas peti jenazah kerabatnya bersama Piter, petugas BP2MI NTT yang tugasnya memang khusus menjemput jenazah pekerja migran di Terminal Kargo Bandara El Tari. "Saya hanya ditelepon saudara dari kampung jemput kakak Sipri (Siprianus Pake Red) di bandara kemudian bawa ke Ende pakai kapal ferry. Kalau tidak salah, sudah lama sakit lever dan baru meninggal di Malaysia," kata Wens.

Ia tak mengetahui secara persis keberadaan kerabatnya itu di Malaysia. Ia hanya tahu almarhum sering membantu saudara-saudaranya yang tak mampu di kampung halaman dengan mengirim uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Bapatua (Bapak Red) sudah lama di Malaysia. Sudah sekitar 7 tahun di sana. Bapatua ikut saudara yang sudah duluan kerja di sana, jadi memang tidak punya dokumen. Istri dan anaknya juga masih di Malaysia . Mereka masih urus dokumen untuk pulang ke sini. Ada banyak saudara-saudara yang kerja di Malaysia setelah ada saudara yang berhasil di sana," kata Wens.

Sambil sesekali menyeka keringat di dahinya, Wens yang masih kuliah semester 7 di Universitas Terbuka di Kupang terus membantu membungkus peti jenazah berisi jenazah kerabatnya menggunakan plastik transparan. Selang 15 menit, kemudian Wens meminta ijin kepada Piter, petugas BP2MI untuk pergi ke loket rapid test di bandara El Tari Kupang. Usai menjalani tes, Wens naik ke atas mobil jenazah bersama Piter, petugas BP2MI berangkat menuju Pelabuhan Bolok.

Wens mendapat tugas dari keluarga untuk membawa jenazah kerabatnya ini dengan kapal ferry mendarungi Laut Sawu selama semalam dari Kupang Pulau Timor ke Ende di Pulau Flores. "Di sana (Ende) keluarga sudah tunggu, jadi nanti dibawa ke rumah orang tua selama semalam baru besoknya di makamkan," ujarnya.

Dua peti jenazah lainnya yaitu Gasper Klau dan Adriano Pareira juga dibawa ke tempat khusus jenazah untuk dibungkus lagi dengan plastik transparan sebelum dinaikkan ke mobil jenazah untuk dibawa ke kampung halamannya di Malaka. Saking banyaknya, jumlah jenazah pekerja migran asal NTT dari Malaysia, membuat otoritas Bandara El Tari Kupang harus membangun Tempat Khusus Jenazah di sisi kanan terminal kargo dengan ukuran 6 x 6 meter persegi tanpa sekat dengan sebuah tempat seperti meja di tengah sebagai tempat penyimpanan peti jenazah.

Kepulangan tiga jenazah PMI non prosedural ini menambah panjang daftar PMI asal NTT yang meninggal di luar negeri. Sesuai catatan UPT BP2MI Wilayah Nusa Tenggara Timur jumlah jenazah PMI yang meninggal per Januari-Oktober 2021 berjumlah 106 orang terdiri atas laki-laki 73 orang dan perempuan 33 orang. "Semua jenazah PMI ini nonprosedural, Namun dalam pelayanan, kami tidak membedakan antara PMI yang prosedural dan nonprosedural," ujar Kepala UPT BP2MI NTT, Siwa kepada media ini pekan lalu.

Di masa pandemi Covid-19 kata Siwa, masih saja ada jenazah pekerja migran asal NTT yang dipulangkan dari Malaysia. Sesuai data tahun 2020 jenazah PMI yang dikirim pulang sebanyak 87 orang terdiri dari laki-laki 59 orang dan perempuan 20 orang. Dari jumlah ini yang dikirim resmi hanya 10 orang sedangkan sisanya 77 orang dikirim secara nonprosedural.

Sedangkan tahun 2019 sebanyak 119 jenazah yang dipulangkan yaitu laki-laki 92 orang dan perempuan 27 orang. Dari jumlah ini hanya 2 orang yang dikirim secara resmi sedangkan sisanya 117 orang nonprosedural. Jumlah pekerja migran yang meninggal tersebut meningkat dibanding tahun 2018 yang tercatat sebanyak 115 jenazah. "Jumlah ini, belum termasuk jenazah yang telah dimakamkan di Malaysia," ujarnya.

Siwa menyebutkan bahwa sejak Januari-Okttober 2021, sebanyak 106 pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT, meninggal di luar negeri. Ironisnya, dari 106 PMI tersebut, semuanya nonprosedural alias tanpa dokumen resmi.

Menurut dia, rata-rata jenazah pekerja migran nonprosedural yang dipulangkan akibat dari migration culture yang sudah berlangsung lama. Kultur inilah yang membuat para pekerja migran enggan bekerja di luar negeri (Malaysia Red) secara prosedural. "Jauh sebelum NTT terbentuk, sudah ada migrasi dari saudara-saudara kita yang di Flores. Jadi memang sangat sulit diubah sehingga butuh kerja keras dan kerja bersama semua pihak," tegasnya.

Pun begitu, Siwa tak menampik bila sejumlah pekerja migran yang meninggal di luar negeri merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dan TPPO ini merupakan masalah bersama bukan hanya menjadi masalah pemerintah karena itu penyelesaiannya pun harus dilakukan bersama melibatkan semua stakeholder guna mengungkap jaringan TPPO di NTT.

Penyelesaian TPPO di NTT tidak bisa dilakukan secara parsial namun secara bersama-sama. Termasuk dalam membangun kesadaran masyarakat menggunakan jalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri. Menjadi pekerja migran dan bekerja di luar negeri demi memperbaiki ekonomi keluarga dan masa depan bukan sesuatu yang tabu atau haram. Akan menjadi haram, jika proses untuk bekerja di luar negeri sebagai PMI dilakukan dengan cara nonprosedural alias melawan hukum.

## Kebijakan Moratorium Pengiriman PMI



Jauh sebelumnya, sejak tahun 2017 silam, pemerintah sudah menetapkan Propinsi NTT sebagai zona merah perdagangan orang. Korban perdagangan orang dari NTT menempati ranking teratas, disusul daerah zona merah yang lain yakni Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sesuai laporan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, menyebutkan bahwa pekerja migran nonprosedural dengan modus perdagangan orang yang digagalkan keberangkatannya, sebanyak 519 (tahun 2017), 1.379 orang (tahun 2018) dan 816 di tahun 2019.

Pemerintah Provinsi NTT mengklaim telah melakukan serangkaian tindakan dalam upaya memberantas perdagangan orang. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat telah menghentikan pengiriman sementara (moratorium) melalui Keputusan Gubernur NTT nomor 357/KEP/HK/2018 tgl 14 November 2018 tentang Pemberhentian Pemberangkatan Calon PMI/PMI asal NTT ke luar negeri dan nomor 358/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang pemberhentian calon tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) asal NTT keluar.

Selain itu Pemprov NTT telah membentuk Gugus Tugas melalui keputusan Gubernur NTT nomor 24/KEP/HK/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta calon TK AKAD nonprosedural di NTT. Gubernur NTT juga telah menandatangani MoU dan perjanjian kerja sama antara dengan PT. Angkasa Pura dan Lanud El Tari pada 25 Maret 2019. Menandatangani MOU dengan para bupati/walikota terkait penanganan penempatan dan perlindungan tenaga kerja pasca moratorium

*Isu perdagangan orang dan aktivitas sosial politik warga dalam agregasi gender. Dalam pengukuran pengetahuan masyarakat berjenis kelamin perempuan memiliki derajat kecenderungan yang lebih tinggi pada aspek pengetahuan tentang perdagangan orang dan aktivisme dalam organisasi sosial, politik, keagamaan. Laki laki 59% tidak tahu, sementara perempuan 55% mengetahui*

di Kupang, 8 Mei 2019 serta pembentukan Tim Satgas di 10 kabupaten guna penanganan di pintu masuk/keluar NTT, bandara dan pelabuhan laut.

Kebijakan Pemprov NTT mendapat beragam reaksi dari sejumlah lembaga yang selama ini konsen berjuang mencegah TPPO di NTT. Pendeta Emmy Sahertian, pemerhati masalah pekerja migran dari Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) mengatakan moratorium berpotensi tidak mengakhiri permasalahan dan justru memunculkan masalah baru. Hasil penelitian GMIT bekerjasama dengan Zero Human Trafficking Network, lembaga Mensen Met Een Missie dan Migrant Care menyebutkan bahwa efektivitas dan signifikansi kebijakan moratorium sebagai strategi pemberantasan persoalan pekerja migran yang di dalamnya termasuk praktik-praktik perdagangan orang sangat bergantung dengan penyikapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Intinya, sebut Pendeta Emmy Sahertian, adalah bagaimana kebijakan tersebut mendorong sikap masyarakat terhadap situasi permasalahan yang terjadi. Peninjauan terhadap dampak kebijakan terhadap sikap masyarakat atas praktik perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur menjadi penting untuk dibahas. "Sayangnya, rencana waktu penelitian dan agenda penelitian yang rencananya dilakukan dari Desember 2019-November 2020, mengalami penundaan karena pandemi Covid 19," jelasnya.

Menurut dia, dalam tahapan survei, pengumpulan data dilakukan di 16 desa dari 8 kecamatan yang tersebar di tiga kabupaten/kota yaitu Kota Kupang, Sikka dan Manggarai Barat dengan sampel bertingkat (stratified sampling). Hasil pengukuran terhadap sikap masyarakat yang dilakukan melalui survei kepada 1173 responden (505 laki-laki dan 668 perempuan) di tiga wilayah penelitian Kota Kupang, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sikka menunjukkan sejumlah temuan yang menggambarkan bagaimana kesadaran kritis dan sikap masyarakat terhadap perdagangan orang sesuai dengan konteks situasi dan wilayah masing-masing.

Secara umum kata dia, pengetahuan masyarakat masih terbatas terkait perdagangan orang yang mana salah satu penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan orang adalah masih lemahnya sosialisasi. Sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran dan sikap kritis merespons praktik perdagangan orang. Sedangkan dua wilayah (Kota Kupang dan Kabupaten Sikka) menunjukkan derajat yang cukup tinggi dalam pengetahuan tentang perdagangan orang yakni Kota Kupang = 80,9% mengetahui, Kabupaten Sikka = 62,6% mengetahui. "Hal ini berbeda dengan Kabupaten Manggarai Barat, di mana 56% responden tidak mengetahui perdagangan orang," katanya



Survei tersebut juga menyebutkan bahwa pengetahuan secara lebih spesifik terkait dengan sumber informasi tentang perdagangan orang menunjukkan derajat yang dominan dari peranan media massa dan media sosial sebagai agen informasi tentang perdagangan orang. "Isu perdagangan orang dan aktivitas sosial politik warga dalam agregasi gender. Dalam pengukuran pengetahuan masyarakat berjenis kelamin perempuan memiliki derajat kecenderungan yang lebih tinggi pada aspek pengetahuan tentang perdagangan orang dan aktivisme dalam organisasi sosial, politik, keagamaan. Laki-laki 59% tidak tahu, sementara perempuan 55% mengetahui," jelas Pendeta Emmy lagi.

Dalam survey ini pun terungkap jika sebagian besar responden menilai moratorium tersebut tidak melanggar hak masyarakat, namun pemerintah perlu menyediakan lapangan kerja. Survey juga menunjukkan bahwa ada derajat yang tinggi yang menyatakan setuju bahwa walaupun ada keterdesakan ekonomi semua orang tanpa memandang umur bisa bekerja ke luar negeri. Begitu pun ada kesadaran pada masyarakat bahwa anak-anak tidak boleh menjadi pekerja migran.

"Dalam salah satu kesimpulan survey tergambar jelas bahwa moratorium penempatan pekerja migran di Nusa Tenggara Timur tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk mengurai dan memutus praktik perdagangan orang yang masih marak di propinsi ini, karena tidak adanya upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola dan peta jalan penanggulangan perdagangan yang konkret," pungkasnya.

GMIT sebut Emmy, melihat masalah pekerja migran sebagai sebuah masalah kemanusiaan apalagi sebagian besar yang menjadi korban adalah warga GMIT. Karena itulah gereja (GMIT) terpanggil untuk membela dan melindungi warganya dan membantu pemerintah mencegah praktik TPPO. Salah satu dengan melakukan penelitian untuk membaca trend migrasi pekerja migran asal salah satu klasis GMIT yaitu Klasis Amanuatan Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.

"Penelitian ini dilakukan secara mandiri berdasarkan semangat kerelawan dan cinta kasih terhadap sesama. Penelitian ini melibatkan berbagai relawan dari lingkup jemaat hingga kerjasama oikumene dengan jaringan dari Gereja Katholik selama rentang bulan November dan Desember 2017 lalu," ujarnya.

Dari penelitian ini kata dia, ditemukan bahwa trend tertinggi adalah migrasi anak dan pemuda, usia migrasi 15-29 tahun mencapai 56,1%. Kemudian usia tertinggi saat migrasi usia 20-24 tahun atau 23,2% dan usia tertinggi kedua datang dari irisan usia anak menjelang dewasa 15-19 tahun yaitu 17,2%. Selain itu diperoleh data rata-rata migrasi ke luar negeri berpendidikan SD 31,7%, SMP 11%, SMA 13% dan tidak tamat SD 9%. Penelitian ini diketahui terbayak bekerja di luar negeri karena diajak yaitu 61,79% sisanya pergi begitu saja 22,3%, kemauan sendiri 5% dan 0,6% melalui PTJKI dan sisanya tidak tahu. Diketahui pula tiga alasan utama pergi bekerja ke luar negeri yaitu membantu ekonomi keluarga 52,55%, mencari hidup sendiri 26,76% dan tidak menjawab 9,66%

## NTT Surga Pelaku TPPO

Koordinator Divisi Advokasi Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Paul Sinlaeloe menyebutkan faktor utama TPPO di NTT akibat tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja. Selain itu, rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat mudah terjebak dalam tindakan praktik perdagangan orang, baik dalam kapasitasnya sebagai pelaku maupun korban. "Kesadaran dan pemahaman hukum terkait Undang Undang TPPO yang belum memadai baik pada level eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pada tataran masyarakat kebanyakan," kata Paul.

Secara blak-blakan, Paul Sinlaeloe menyebut bahwa Provinsi NTT dengan kondisi geografis kepulauan menjadi surga bagi para pelaku TPPO. Menurut Paul, sejak 2010-2020, PIAR NTT telah mengadvokasi 57 kasus TPPO dengan korban sebanyak 1.103 orang. Rinciannya perempuan 220 orang dan laki-laki 883 orang. "Dari 1.103 orang korban TPPO yang didampingi oleh PIAR NTT sepanjang tahun 2010-2020 ini, terdapat 734 orang di antaranya berusia dewasa, sedangkan yang berusia anak sebanyak 369 orang," jelasnya.

Menurut Paul, merajalelanya perdagangan orang di NTT karena pemerintah provinsi sampai pemerintah desa, beserta jaringan terkait seperti BP2MI, APJATI dan gugus tugas TPPO, tidak mampu melakukan pencegahan, dengan membiarkan tetap berjalan sistem pengelolaan ketenagakerjaan mulai dari rekrutmen tenaga kerja, prapenempatan, penempatan, hingga purna penempatan. Karena itu Paul Sinlaeloe meminta keseriusan Pemda NTT (pemprov, pemkab/pemkot) agar segera memberlakukan darurat human trafficking. Jika tidak maka kasus serupa akan terulang dengan korban yang terus bertambah. "Ini adalah kejahatan extra ordinary crime yang harus ditangani secara serius. Meski sudah ada proses hukum terhadap pelaku human trafficking namun kasus yang sama selalu terulang," beber Paul.

Ia menilai TPPO di NTT berjalan secara masif karena kasus yang sama selalu terulang dengan modus yang sama. Padahal, berbagai jaringan human trafficking di NTT telah diberangus sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo. "Tahun ini saja, sudah 106 jenazah pekerja migran asal NTT yang dikirim pulang dalam keadaan meninggal dunia. Kita minta keseriusan Pemda NTT baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memberlakukan darurat human trafficking," tegasnya.

PIAR NTT kata Paul, mendukung penuh langkah Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, yang di awal kepemimpinan telah mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran. Sayangnya, hal ini tak diikuti perbaikan sistem. TPPO sebut Paul sebagai kejahatan extra ordinary crime yang harus ditangani secara serius. Meski sudah ada banyak kasus yang diproses hukum terhadap pelaku human trafficking namun kasus yang sama selalu terulang.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural asal Nusa Tenggara Timur yang dipulangkan dari Malaysia sementara disimpan sementara di Tempat Jenasah Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang sebelum dikirim ke kampung halamannya, Rabu (27/10/2021)." width="100%" />PIAR NTT kata dia, merilis upaya pencegahan TPPO dengan melakukan pendekatan berbasis masyarakat (community based approach). Pendekatan ini dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah TPPO. Jadi, mengapa masyarakat harus berperan serta dalam pencegahan TPPO selain karena menjadi tanggung jawab kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam UUTPPO. "Keterlibatan masyarakat ini demi meluaskan dukungan sebuah gerakan pencegahan, tetapi memenuhi hak dan demokrasi. Sebab masyarakat adalah pilar terdepan yang langsung berhadapan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) terkait pencegahan TPPO," imbuhnya.

Sementara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat kepada puluhan jurnalis di Kupang, Kamis 4 November 2021 memberi dukungan penuh sesuai kewenangannya kepada terhad berbagai upaya pemberantasan TPPO di NTT. Menurutnya, banyak sekali warga NTT yang keluar mencari kerja di luar negeri dan tak sedikit yang pulang dan membawa kabar keberhasilannya. Namun sedikit sekali yang mau memceritakan tentang kesulitan dan penderitaannya.

Viktor mengakui jika masalah kemiskinan memberi andil dalam kasus human trafficking karenanya kemiskinan mesti ditangani. Untuk menangani masalah kemiskinan di Indonesia dan NTT, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. "Harus didesain pembangunan tingkat desa, APBD kabupaten/kota, provinsi, melalui dana desa dan berbagai sumber anggaran total Rp 43 triliun sedang didesain fokus ke program dalam rangka pemberdayaan masyarakat," ujar Viktor Laiskodat.

Upaya pemberantasan TPPO di NTT pun datang dari Polda NTT seperti diungkapkan Kabid Humas, Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif berjanji menindak tegas pelaku TPPO termasuk semua pihak yang terlibat. Selama tahun 2021 ini jelas dia, Polda NTT menangani 9 kasus TPPO di mana 1 kasus dinyatakan lengkap alias P21, 4 kasus dalam penyidikan dan 4 kasus sementara dalam penyelidikan.

"Jajaran Polda NTT tetap berkomitmen mengusut tuntas setiap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang baik yang dilaporkan di tingkat Polsek, Polres maupun Polda NTT. Komitmen ini merupakan perintah langsung bapak Kapolda NTT memerangi TPPO yang marak di NTT," tegas Kabid Humas Polda NTT, Rishian Krisna Budhiaswanto kepada media ini, Senin, 8 November 2021.

Selain melakukan penindakan jelas Rishian, Polda NTT melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi bahaya bekerja di luar negeri secara non prosedural. Sosialisasi ini dilakukan bahkan dilakukan sampai ke tingkat paling bawah oleh Babinkamtibmas di tingkat kelurahan/desa. Polda NTT pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan melaporkan setiap mobilitas warga yang dicurigai hendak merekrut pemuda/pemudi bekerja di luar NTT. "Anggota kita di lapangan akan langsung melakukan cross shek dan mengambil tindakan preventif bila ada indikasi oknum yang mau merekrut pekerja migran di daerah-daerah," ujarnya.

Soal dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam jaringan mafia TPPO, Rishian Krisna meminta bantuan masyarakat supaya melaporkan kepada pihaknya. Polda NTT tidak menutup diri terhadap oknum anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. "Sanki tegas kan kita berikan,. Tahun ini saja, sudah 11 anggota Polda NTT yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran. Silahkan laporkan, Bila cukup bukti pasti akan kita proses," tegas Rishian Krisna.

\*Liputan ini merupakan hasil Fellowship yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama International Labour Organization (ILO) dan dimonitor oleh Mustafa Silalahi.

# Ida Farida Berjuang Mendapatkan Hak Sebagai Pekerja Migran



► Dian Wahyu/Lampung Post/12 November 2021

**Pekerja migran asal Lampung merasa tertipu, tidak mendapat hak cuti, gaji satu bulan hilang dan dokumen tak kunjung pulang.**

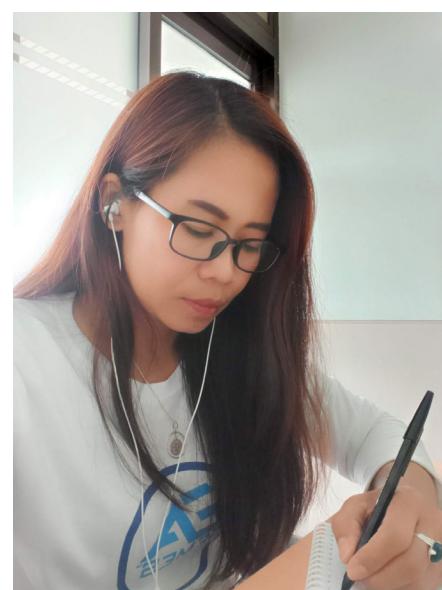
IDA Farida (45 tahun) tidak mengetahui sama sekali bahwa menjadi seorang pekerja migran Indonesia (PMI) ternyata ada tidak enaknya. Yang ia bayangkan, pekerja migran punya penghasilan lebih baik dibanding di desa.

Pada Sabtu, 30 Oktober 2021, Ida Farida asal Lampung Barat menceritakan pengalamannya saat menjadi pekerja rumah tangga di Melaka, Malaysia, melalui sambungan telepon Sabtu, 31 Oktober 2021.

Tiga tahun lalu, suaminya meninggalkan Ida begitu saja. Dua orang anaknya mesti mendapat perhatian dan kebutuhan. Tak lama, seorang kerabatnya mengajaknya untuk bekerja di luar negeri. Ida berpikir kalau penghasilan di luar negeri bisa mencukupi kebutuhan anaknya. Dua Anaknya pun bisa dititip kepada kedua orang tuanya.

Ida bisa berbahasa Inggris berbentuk percakapan dasar. Dengan modal itu, ia niatkan untuk bekerja di Malaysia. Dokumen dan kelengkapan pun ia siapkan.

Ia menyiapkan dokumen KTP, Kartu Keluarga, Buku nikah, Ijazah SMP, dan surat pengantar dari desa. Selanjutnya, pengurusan paspor dan visa



dilakukan oleh sponsor, perpanjangan tangan dari perusahaan. Ida menjadi PMI sesuai prosedur. Ia dijanjikan gaji oleh agen di Lampung yakni sejumlah 1.100 ringgit atau Rp3.740.000 (kurs 3.400).

Pekerja migran asal Lampung Barat ini merasa tertipu. Meski mendapat gaji 1.100 ringgit, tapi Ida tidak mendapat hak cuti, kesulitan mendapat akses komunikasi, gaji satu bulan hilang serta dokumen tak kunjung kembali.

"Menurut saya banyak sekali, bukan kecurangan ya, karena mungkin itu, kalau buat saya si kecurangan dari pertama saya masuk ke PT tersebut. Waktu itu PT-nya bernama PT CSI, tapi dari kabar yang saya dapat ternyata sekarang PT itu sudah berganti nama dan berpindah alamat juga," ujar Ida.

Sampai sekarang dokumen masih berada di PT CSI. Dokumen Ida berupa KTP, KK, Surat Nikah, Ijazah yang semua dokumen itu asli. "Sampai sekarang semua dokumen itu masih tertahan di mereka (PT CSI)," tuturnya.

Ida bekerja di Malaka, Malaysia, dengan kontrak kerja 2 tahun. Waktu itu, ia tidak tahu seluk beluk menjadi pekerja migran. Bahkan mengenai kontrak kerja pun, Ida mengaku tidak memahami isi kontrak kerja tersebut.

"Saya mengetahuinya setelah saya sudah berada di Malaysia. Waktu di Malaysia, yang pertama saya tidak dapat cuti, saya benar-benar tidak bisa keluar, maksudnya tidak bisa keluar sendiri, jadi keluar memang harus dengan majikan. Yang pasti saya tidak dapat cuti, tidak bisa bersosialisasi, dan tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar," tambahnya.

Merasa tak mendapat haknya, saat berada di Malaysia, Ida aktif berkomunikasi dengan NGO migran di sana seperti North South Initiative (NSI) dan komunikasi pekerja migran lainnya. Ida sempat mengirim dokumen kontrak kerjanya melalui akun media sosial Facebook kepada Adrian Pereira B. Eng, selaku Direktur Eksekutif NSI Selangor, Malaysia.

Ia baru mengerti kontrak kerja mengenai gajinya ketika Adrian memberitahunya. Adrian Pereira menjelaskan kepada Ida bahwa gaji pokoknya bukan 1.100 ringgit, tapi 900 ringgit atau Rp3.060.000 (kurs 3.400)

Ternyata gaji pada isi kontraknya hanya 900 ringgit, belum termasuk cuti. Jadi total gaji Ida satu bulan adalah 1.100 ringgit (900 gaji pokok ditambah 200 pengganti cuti).

"Karena cuti itu sudah dibayarkan, padahal seharusnya kan gaji pokoknya itu 1.100 terus kita sudah dapat cuti. Seharusnya seperti itu, tetapi kenyataannya tidak seperti itu," ucap Ida.

Ida tidak bisa menuntut lebih, karena merasa tidak memahami kontrak kerja tersebut. Melalui sambungan telepon, Yuni, perwakilan agensi pernah bilang ke Ida bahwa pekerja migran dari Indonesia memang tidak ada hak cuti, karena hal itu sudah jadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, bahwa PRT dari Indonesia itu tidak ada cuti.

Saat itu Ida bertanya, "pemerintah mana yang membuat kesepakatan seperti itu?" Tapi, Yuni tidak menjawab dan langsung memutus telepon.

## Pulang ke Rumah

Ida bercerita ia berangkat ke Malaysia tanggal 23 Mei 2018, dan pulang bulan Maret 2020. Seharusnya Ibu dua orang anak ini pulang bulan April, namun karena Ayahnya sakit dan sebelumnya ibunya meninggal, ayah Ida memintanya pulang.

Dari bulan November 2019, Ida sudah mengajukan untuk putus kontrak. Ia minta untuk pulang karena alasan ayahnya sakit, namun agensi tidak memberikan izin itu dengan alasan masih dalam proses. Sampai bulan Februari 2020, Ida berkata ke majikannya bahwa ia tidak bisa menunggu lagi karena ayahnya sudah sakit keras bahkan sudah masuk ke rumah sakit.



***Masalah yang ada di desa kami menurun drastis tanpa ada pemalsuan dokumen. Pernah ada yang minta kami teken surat, sudah menikah tapi ditulis belum menikah. (Upaya) Ini untuk menghindari TPPO***

Meski ia sudah mendesak namun belum ada tanda-tanda akan direalisasikan, akhirnya adiknya menelepon Adrian Pereira B. Eng, Executive Director North South Initiative, Selangor, Malaysia untuk minta tolong kepada Yuni perwakilan agensi.



Kemudian Adrian memberikan kontak orang dari KBRI Johor. Waktu itu KBRI Johor menelepon ke Jakarta ke PT itu, dari situlah Ida bisa pulang.

Sempat terjadi keributan saat ada staf KBRI Johor menghubungi KBRI Jakarta dan menghubungi agensi di Malaysia. Ida pun dipanggil oleh agensi karena mereka tidak terima ia melapor ke KBRI Johor.

Berdasarkan Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI pada September 2021 menunjukkan Lampung menjadi 5 Provinsi pengaduan terbanyak. Pada September 2021, ada 8 orang atau 5% total 160 pengaduan PMI di Indonesia.

Ida melaporkan kasusnya yaitu penahanan dokumen administrasi oleh perusahaan penahanan 1 bulan gaji yang dijanjikan perusahaan, serta ketidakjelasan gaji dalam kontrak.

Ia melanjutkan ada aturan saat masuk PT itu dipotong gajinya 2,5 bulan, 1,5 bulan adalah potongan dari agen dan yang 1 bulan gaji akan ditahan oleh PT. Ketika Ida pulang, si agen mengatakan nanti jika sudah pulang ke Indonesia uang yang satu bulan itu akan ditransfer, namun sampai sekarang uang itu belum diterima Ida.

Lalu agen yang di Malaysia mengatakan bahwa ia pulang karena kontrak sudah selesai. Seharusnya ia pulang tanggal 26 April, tapi karena sudah memasuki pandemi Covid-19, Ida diminta pulang lebih awal pada tanggal 21 Maret 2020.

Sekarang Ida mengaku sudah tidak memiliki kontak ke agen itu (PT CSI). Ia hanya punya kartu nama, namun ternyata itu nomor agen.

Menyikapi yang dialami Ida, Koordinator Program Safe and Fair, International Labour Organization (ILO) Sintia Hakrisnowo Minggu (7/11) menjelaskan masalah dasar pekerja migran khususnya pekerja di sektor rumah tangga yakni mengenai pemahaman hak dan kewajiban saat bekerja misalnya tidak ada standar upah serta perbedaan regulasi di Indonesia dan di luar negeri.

"Apalagi saat pandemi, membuat posisi mereka (PMI) rentan bekerja di luar negeri," katanya.

Mengenai PMI yang tidak paham kontrak kerja, Sinthia menjelaskan mestinya pekerja bisa mengetahui hal tersebut karena ada pelatihan selama tiga bulan. "Tapi di BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) yang diberikan hanya bahasa, skill bagaimana memakai microwave, penyedot debu dan sebagainya," ujarnya.

Lalu, ada orientasi pra keberangkatan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yang dilakukan hanya satu hari. Menurutnya, hal ketenagakerjaan tidak bisa dilakukan dalam satu hari saja.

"Harusnya informasi hak ketenagakerjaan, diberikan sebelum memutuskan untuk bekerja. Kalau ingin mencegah pekerja migran dari TPPO (tindak pidana perdagangan orang) ya sosialisasi ke desa," ujarnya.

Sinthia menjelaskan dari isi Undang-undang Nomor 18 tahun 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka perangkat desa bisa menjadi palang untuk mencegah kasus yang terjadi bagi PMI. Lalu, perangkat desa juga bisa menjelaskan mengenai UU migrasi maupun UU TPPO.

"Latih ke desa, perangkat desa, saat mereka (PMI) bekerja, (perangkat) desa bisa menerangkan berapa tahun kontraknya," ujarnya.

## Masalah Buruh Migran di Masa Pendemi

Pekerja Migran di masa pandemi Covid-19 banyak mengalami kerentanan dan kekerasan. Armayanti Sanusi dari Solidaritas Perempuan (SP) Sebay Lampung menuturkan selain mengalami kekerasan, perempuan PMI rentan mendapatkan pelecehan dan eksploitasi tindak pidana perdagangan orang di setiap tahapan migrasi di masa pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan perempuan pekerja migran asal Lampung harus mengalami persoalan lainnya seperti overstay di negara penempatan, terjebak lockdown, terjebak di penampungan tanpa ada kepastian berangkat ke negara tujuan, serta gagal berangkat karena pandemi Covid-19. Selain itu saat perempuan PMI tiba di kampung halaman kerap mendapatkan stigma penyebar Covid-19 di desa.

Berdasarkan penemuan lapangan Solidaritas Perempuan Sebay Lampung dan ILO melalui Program Migrant Workers Resource Center (MRC) Lampung Timur, banyak calon PMI yang masih terlantar di penampungan karena belum mendapat kepastian kapan akan diberangkatkan ke negara tujuan akibat dampak pandemi Covid-19.

"Perempuan buruh migran mengalami pemerasan oleh perusahaan atau agen bahkan ada yang diminta membayar uang pengganti lebih besar dengan alasan bahwa agen telah membiayai kebutuhan dan keperluan perempuan pekerja migran saat di penampungan," ujarnya, Kamis 28 Oktober 2021.

Armayanti menuturkan cara mendampingi Pekerja migran asal Lampung yakni melalui program safe and fair migration dan kerja layak, bertujuan agar calon PMI bebas dari kekerasan dan praktik-praktik yang buruk berupa fisik, seksual, perdagangan manusia, psikologis, yang dilakukan oleh pasangan dan pihak lain termasuk kekerasan pada proses eksploitasi kondisi kerja dan migrasi.

Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat layanan informasi migrasi aman bagi calon PMI, melalui anggaran dan program, layanan informasi migrasi aman berbasis desa.

"Memperkuat koordinasi antar lembaga melalui integrasi Layanan untuk mendukung penyampaian informasi dan layanan yang efektif dan efisien bagi perempuan pekerja migran dan keluarganya," ujarnya.

Selanjutnya dalam satu tahun terakhir, SP Sebay Lampung bersama ILO telah menangani 4 kasus di antaranya yang pertama kekerasan berbasis gender dan eksploitasi kerja. Kemudian gaji dan cuti tidak dibayar oleh majikan dan agency (pekerja informal). Ketiga, kasus pekerja formal, ABK Kapal gaji tidak dibayar, yang keempat trafficking dan perekrutan ilegal calon PMI di negara yang bukan penempatan yaitu Turki.

"Tantangan dalam melakukan advokasi tentunya tidak terlepas dari waktu yang panjang, dalam menangani satu kasus butuh waktu bertahun-tahun dalam menyelesaiannya," tambah Armayanti.

## Pencegahan Dari Desa

Untuk menghindari adanya penipuan dari perusahaan yang tidak bertanggungjawab, Ketua SBMI Lampung, Sukendar Kamis 4 November 2021 menjelaskan jika ada warga desa yang mau ke luar negeri, misalnya perempuan maka harus mendapatkan izin dari suami.

"Suami harus datang ke balai desa, sponsor juga begitu, apa jelas PT-nya," kata Sukendar yang juga selaku Kepala Desa Margototo, kabupaten Lampung Timur.

Sejak dilantik menjadi kepala desa pada 31 Desember 2019 lalu, Sukendar mulai memberlakukan aturan tersebut. "Kalau ada masalah administrasi ke kepala desa, kalau ada kasus dibantu SBMI," ujarnya.

Ia menuturkan banyak sponsor yang berada di Lampung Timur. Namun, meski demikian ia ingin sponsor tersebut bertanggungjawab terhadap pekerja migran. "Kami minta boleh bisnis di desa tapi bertanggung jawab, jangan ada human trafficking," tambahnya.

Diketahui, data BP2MI, Penempatan Pekerja Migran asal Lampung Timur pada September 2021 mencapai 159 orang dari 386 orang.

***Menurut saya banyak sekali, bukan kecurangan ya, karena mungkin itu, kalau buat saya si kecurangan dari pertama saya masuk ke PT tersebut. Waktu itu PT-nya bernama PT CSI, tapi dari kabar yang saya dapat ternyata sekarang PT itu sudah berganti nama dan berpindah alamat juga***

"Masalah yang ada di desa kami menurunkan drastis tanpa ada pemalsuan dokumen. Pernah ada yang minta kami teken surat, sudah menikah tapi ditulis belum menikah. (Upaya) Ini untuk menghindari TPPO," ujarnya.

Sukendar menuturkan desa bisa menjadi palang pintu pertama untuk perlindungan PMI. Pihaknya telah menyusun peraturan desa tentang perlindungan pekerja migran di desa.

Karena penerapan kepedulian terhadap pekerja migran itulah, Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, kabupaten Lampung Timur, mendapat apresiasi dari Kementerian Luar Negeri yakni penghargaan HWPA atau Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award pada 18 Desember 2020 lalu.

Sementara itu, Mujianto Ketua SBMI Lampung Timur saat ditemui Minggu 31 Oktober 2021, menjelaskan SBMI harus bisa sinergi dengan pemerintah. Ke depan akan hadir SBMI Tulang Bawang Barat. Lalu sekretariat MRC di Lampung Timur juga akan diresmikan pada akhir November tahun ini.

Mengenai aturan-aturan bagi pekerja migran seperti ponsel tidak boleh gunakan setiap hari menurut Mujianto jelas melanggar. Asalkan pekerja migran tidak memegang ponsel saat bekerja.

Lalu ia menambahkan, pekerja migran harus mendapat hak cuti atau libur. Kalau tidak menurutnya itu sudah masuk ke ranah human trafficking.

## Standar Prosedur

Untuk membantu pekerja migran yang mengalami penipuan dan kekerasan sejumlah CSO di Lampung sedang menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Rujukan atau Layanan bagi Perempuan Pekerja Migran dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan TPPO.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Damar, Sely Fitriani Kamis (28/10) menilai perempuan pekerja migran Lampung rentan mengalami berbagai bentuk penipuan maupun kekerasan seperti masalah dokumen, kekerasan verbal, fisik, pelecehan seksual hingga pemerkosaan.

Sely menuturkan berbagai macam bentuk kekerasan ini berakibat buruk bagi perempuan pekerja migran dan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental seperti depresi, stres, luka-luka fisik, kehamilan tidak diinginkan sampai pada kematian.

Untuk melindungi pekerja migran di Lampung ada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Trafiking. Lalu, ada Peraturan Gubernur Lampung No. 24 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya, LAdA DAMAR bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung atas dukungan UN Women Program Save and Fair, telah memfasilitasi Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Rujukan/Layanan bagi Perempuan Pekerja Migran dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan TPPO pada 16-17 September 2021 lalu.

"Sudah ada rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, CSO berkomitmen memperkuat tim gugus tugas, untuk memperkuat pencegahan dan penanganan," kata Sely.

Adapun rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut berupa penyusunan SOP Mekanisme Rujukan atau Layanan bagi Perempuan Pekerja Migran dan Anak Korban KBG dan TPPO, yang secara bersama dilakukan oleh Tim Satgas TPPO Provinsi Lampung.

Rujukan atau Layanan bagi Perempuan Pekerja Migran dan Anak Korban KBG dan TPPO ini juga disusun dengan menyesuaikan pada situasi terkini pandemi Covid-19.

Selanjutnya SOP yang nantinya diharapkan dapat disusun menjadi sebuah pergub ini dapat dijadikan acuan lembaga pemberi layanan dalam meningkatkan sinergitas jejaring kerja untuk penyediaan layanan yang berkualitas bagi perempuan pekerja migran korban KBG dan TPPO.

Harapannya tahun ini SOP Mekanisme Rujukan atau Layanan bagi Perempuan Pekerja Migran dan Anak Korban KBG dan TPPO sudah terbentuk. "Saat ini masih berproses," kata Sely.

Sementara itu, pemerintah telah melakukan upaya untuk mencegah TPPO misalnya orientasi pra keberangkatan selama satu hari bagi calon pekerja migran. Waydinsyah, Sub Koordinator Pelindungan dan Pemberdayaan BP2MI Lampung Kamis 4 November 2021 mengimbau kepada masyarakat jika ingin berangkat ke luar negeri hendaknya mendatangi aparat desa untuk mencari tahu informasi seputar tenaga kerja luar negeri. Masyarakat juga bisa mengontak BP2MI Lampung melalui sosial media, maupun nomor telepon. Informasi yang didapat oleh calon PMI ini berguna untuk menghindari TPPO.

Diketahui, Lampung menyumbang urutan empat nasional pekerja migran. Dari data BP2MI pada September 2021, pekerja migran asal Lampung mencapai 386 orang (urutan 4), menyusul Jawa Barat 1.123 orang, Jawa Tengah 1.573 orang, dan urutan teratas yakni Jawa Timur mencapai 2.413 orang.

Dari kasus yang dialami Ida Farida, kini ia memantapkan hatinya menjadi pengurus SBMI. Ia telah dikukuhkan menjadi Ketua SBMI Lampung Barat pada Sabtu 23 Oktober 2021 lalu. Ida berharap bisa menolong warga saat terjadi masalah pekerja migran, sehingga tak ada lagi kasus penipuan maupun human trafficking terjadi lagi di wilayahnya.\*\*\*

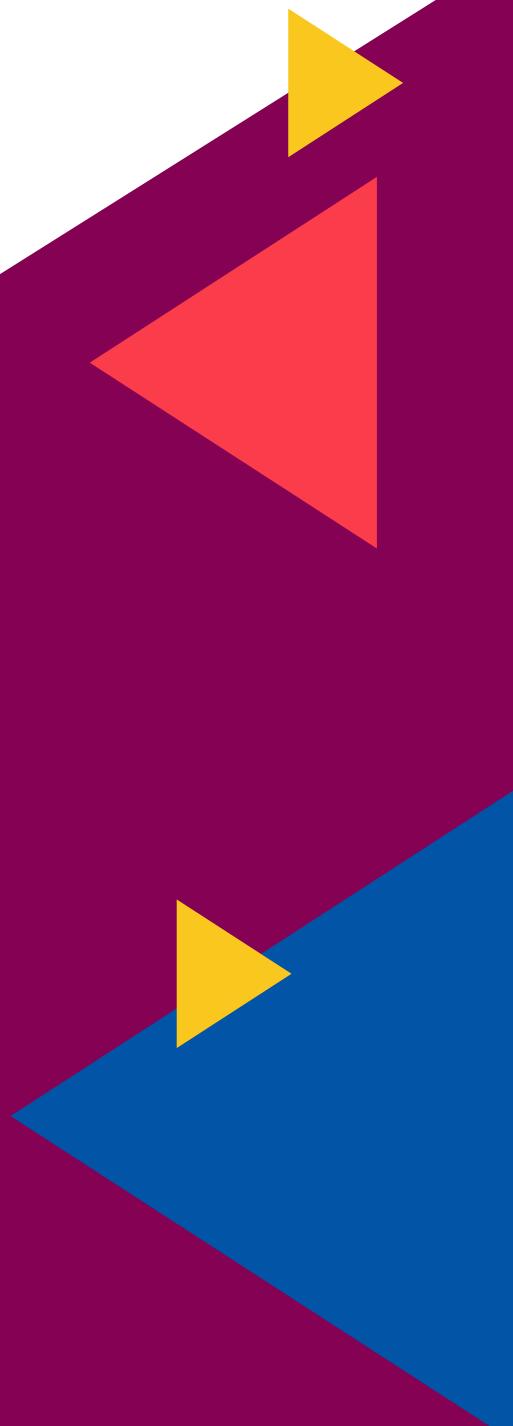
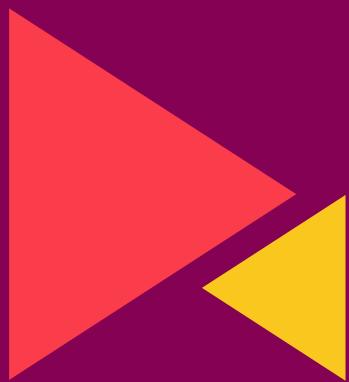
\*Liputan ini hasil Fellowship Save and Fair diselenggarakan oleh AJI Jakarta dan ILO

# Berangkat Tak Resmi, Pulang Dalam Peti Mati - Asa dan Derita Puan Pekerja Migran



► Adinda/Kompas TV/25 November 2021





**International Labour Organization**

Kantor Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22

Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250

INDONESIA

E: [jakarta@ilo.org](mailto:jakarta@ilo.org)

W: [www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta)